

SKRIPSI



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.840/Pid.B/2012/PN.Mks)

OLEH:

ADENAN

B 111 08 344

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.840/Pid.B/2012/PN.Mks)

OLEH:

**ADENAN
B 111 08 344**

SKRIPSI

Diajukan Dalam Ujian Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa,

Nama : **ADENAN**
Nomor Induk : **B 111 08 344**
Bagian : **HUKUM PIDANA**
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan
No.840/Pid.B/2012/PN.Mks).**

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk Diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar

April 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr.H.M.Said Karim,S.H., M.H.

Nur Azisah, S.H., M.H.

ABSTRAK

ADENAN, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.840/Pid.B/2012/PN.Mks) Dibimbing oleh H.M.Said Karim dan Nur Azisah)

Penelitian ini bertujuan : 1.Untuk mengetahui Bagaimanakah Penerapan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang dilakukan oleh Hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan sanksi hukuman kepada Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Putusan No.840/Pid.B/2012/PN.Mks.

2.Untuk mengetahui Jenis-Jenis Sanksi apakah yang diterapkan hakim dalam perkara tindak pidana Narkotika. Putusan No.840/ Pid.B/ 2012/ PN.Mks.

Jenis penelitian adalah penelitian Normatif-Empirik, Metode Analisis yang digunakan adalah Metode Kualitatif untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan Penanganan Tindak Pidana Narkotika.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 1.Penerapan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang dilakukan oleh Hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan sanksi hukuman kepada Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Putusan No.840/Pid.B/2012/PN.Mks, telah sesuai dengan Undang-Undang, disamping menjatuhkan sanksi pidana juga memutuskan memberi kesempatan untuk mengikuti Rehabilitasi untuk menghilangkan atau menyembuhkan ketergantungannya terhadap Narkotika, berdasarkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2.Jenis-Jenis Sanksi yang diterapkan hakim dalam perkara tindak pidana Narkotika adalah Pidana Penjara, Pidana Denda, Perintah Mewajibkan Terdakwa agar menjalani dan mengikuti Rehabilitasi untuk menghilangkan atau menyembuhkan ketergantungannya terhadap Narkotika, berdasarkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan khususnya dalam Putusan No.840/Pid.B/2012/PN.Mks. yang dijatuhkan atau diterapkan adalah Pidana Penjara dan kewajiban mengikuti Rehabilitasi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Karena atas segala rahmatnya juala sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.840/Pid.B/2012/PN.Mks).

Pada tempatnyalah dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Dosen Pembimbing Bapak Prof.Dr.H.M.Said Karim, SH.MH. selaku Pembimbing-I, Ibu Hj.Nur Azisah, SH.MH. selaku Pembimbing-II, yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan intensif sejak persiapan hingga selesainya tulisan ini Skripsi ini. Selanjutnya, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Idrus Paturusi, Rektor Unhas, dan Para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin
2. Para Dosen Penguji Ujian Skripsi, Bapak Prof.Dr.Muhadar, SH.MH. Ibu Haeranah, SH.MH. Bapak Kaisaruddin K, SH.MH. yang telah memberikan saran dan pendapat dalam rangka perbaikan Skripsi ini.
3. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Unhas, beserta para Guru Besar/Dosen pada Fakultas Hukum Unhas. yang telah mendidik, mengajar penulis selama ini.
4. Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Kapolrestabes Makassar, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, atas segala bantuannya sehingga penulis dapat memperoleh data penelitian yang diperlukan.

5. Kepada Ayahandaku, Ibundaku, dan saudara – saudaraku, semua telah mendorong penulis dalam rangka penyelesaian studi di Fakultas Hukum Unhas.
6. Kepada Keluarga Besar Bapak Drs.H.Saggaf Saleh, MH. yang telah memberikan banyak bantuan selama saya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Unhas.
7. Kepada Kekasih Tercinta Hegarmana Saggaf Assyatri yang selama ini mendorong, mensupport dan mendampingi saya selama saya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Unhas.
8. Kepada Teman dan Sahabat Baik dalam Unhas maupun diluar Unhas yang telah membantu saya selama ini.

Penulis sangat menyadari bahwa karya tulis/Skripsi ini masih jauh dari sempurna, dalam hubungan itulah, maka penulis mohon kepada semua pihak berkenan memberi koreksi dan petunjuk yang sifatnya membangun guna perbaikan selanjutnya, Terima Kasih.

Makassar, April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN USULAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	9
B. Penyalahgunaan Narkotika.....	13
1. Pengertian Penyalahgunaa	15
2. Pengertian dan Penggolongan Narkotika.....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	22
C. Penyelidikan Dan Penyidikan	25
1. Pengertian Penyelidik Dan Penyidikan	25
2. Pihak Yang Berwenang Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan.....	26
3. Polri Selaku Penyidik Tindak Pidana Narkotika...	28

4. Proses Penyelidikan dan Penyidikan.....	32
D. Proses Peradilan Pidana	56
1. Tahapan Dalam Perkara Pidana	56
2. Tahapan Penuntutan Pidana.....	58
3. Pembuktian Dalam Perkara Pidana	63
4. Persidangan dan Putusan Hakim	72
5. Tahap Pelaksanaan Putusan Hakim	76

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	78
B. Jenis dan Sumber Data.....	78
C. Teknik Pengumpulan Data.....	78
D. Analisis Data	79

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara	80
B. Pertimbangan Hukum	91
C. Putusan Hakim	100
D. Pembahasan/Komentar Penulis	102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah.

Tujuan Negara Republik Indonesia secara tegas yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bertolak dari hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya peningkatan terus menerus ketersediaan Narkotika sebagai obat jenis tertentu yang sangat dibutuhkan dalam dunia kesehatan, disamping itu obat-obat tersebut perlu pula digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang sedemikian pesat dan hubungan antar Negara yang tidak dapat dihindari sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional, melahirkan fenomena baru adanya tindakan penyalahgunaan Narkotika, bahkan Narkotika telah menjadi objek transaksi perdagangan, baik dalam bentuk lokal, maupun antar Negara, oleh karena itu semua aparat penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu, sepatutnya secara bersama-sama mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika, demi masa depan bangsa Indonesia,

Kepolisian yang merupakan aparat penegak hukum yang berada di garda terdepan dalam penegakan hukum pidana pada umumnya dan tindak pidana

Narkotika pada khususnya, memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kiprah kepolisian sudah mulai mengisi perjalanan hidup dan ketatanegaraan di tanah air. Mereka mengarahkan dengan segala kekuatan jaringan, keahlian, perlengkapan dan personilnya untuk memberantas kejahatan-kejahatan, baik merupakan kejahatan perorangan maupun berupa sindikat pelaku tindak pidana bahkan kejahatan bersifat internasional yang saat ini sangat mudah masuk ke negara kita.

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan (dalam waktu operasi dan untuk penenang) dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Namun demikian, dampak positif dari narkotika sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas. Akibat dari semua itu tanpa ada pengawasan dari petugas yang berwenang akan mengakibatkan ketagihan hingga ketergantungan yang kemudian menimbulkan sebagai permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pemakai narkotika tersebut

dengan menghalalkan segala cara agar mereka dapat memperoleh obat itu sehingga mencuri dan memeras pun dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mendapatkan obat itu.

Perdagangan dan Peredaran gelap narkoba di Indonesia tampaknya semakin marak. Saat ini, narkoba tidak hanya menjadi konsumsi bagi masyarakat di kota besar, tapi bagi masyarakat pedesaan pun narkoba tidak lagi menjadi barang langka. Ironisnya, tidak hanya di kalangan dewasa saja narkoba begitu dikenal dan dikonsumsi, tetapi di kalangan remaja dan anak di bawah umur pun juga sudah mengenal barang haram tersebut. Masalah narkoba adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Gejala perkembangan kejahatan Narkoba di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir semua daerah di Republik ini. Dengan kejadian ini, pada Produsen, Distributor dan Konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.

Permasalahan yang menonjol saat ini adalah terjadi beberapa kasus di Indonesia sekarang ini telah dijadikan tempat pemasaran. Bahkan dijadikan sebagai produsen untuk jenis narkoba. Bila hal ini tidak ditanggulangi, akan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara. Dalam permasalahan tersebut maka sangat diperlukan

adanya tindakan para aparat penegak hukum untuk menanggulangi, memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Diantara Aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting dalam menangani tindak pidana narkotika ialah penyidik. Dalam hal ini adalah Penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkoba.

Dalam menekan pemberantasan tindak pidana narkotika ini dibentuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memberikan arahan, kepastian dan keadilan hukum dalam menekan peredaran gelap narkotika.

Adapun pengertian narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat dengan UU Narkotika) adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam undang- undang ini.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai- nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, dalam Undang-undang ini diatur juga mengenai prekursor narkotika karna prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. (Penjelasan Atas UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, telah menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam, bahwa narkoba telah mengancam langsung masa depan penerus bangsa. Tanpa pencegahan yang serius, ancaman itu bisa berlanjut pada penerus bangsa. Walaupun demikian, mungkin pada umumnya masyarakat belum menyadari dan merasa bahaya narkoba bukan urusannya selama anak atau keluarganya belum menjadi korban. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merabah ke daerah pemukiman, kampus bahkan sekolah- sekolah. Menjalarnya pemakaian narkoba memang sangat merisaukan. Cara menjerat mangsa sudah semakin intensif dan canggih, mulai cara- cara klasik dengan membujuk korban untuk mencoba secara gratis, menawarkan sebagai gaya hidup modern kepada para remaja, mempromosikan sebagai terapi, melangsingkan tubuh hingga sebagai obat mengatasi rasa capek. Yang terakhir dengan cara keji, anak- anak SD di bujuk dengan narkotika berwujud permen dan dipikat dengan uang agar mau mencobanya.

Berkaitan dengan hal tersebut diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah Penyidik. Dalam hal ini adalah Penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkoba khususnya ganja. Situasi yang demikian ini telah mendorong Institusi Kepolisian meningkatkan gerakan perang melawan narkoba yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Disisi lain, secara organisatoris juga terjadi peningkatan upaya- upaya penindakan yang dilakukan jajaran kepolisian dengan melibatkan seluruh potensi yang dimiliki, serta berbagai strategi dalam upaya menindak tegas pelaku kejahatan narkoba.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan di Indonesia, khususnya dalam pemidanaan seharusnya merujuk kepada norma hukum yang bersifat menghukum pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera. Peredaran narkoba saat ini telah meluas dan sarannya menembus ke berbagai daerah, bahkan sampai ke desa-desa sehingga membuat cemas masyarakat dan pemerintah. Pemberantasan dan Penegakan Hukum terhadap Pelaku tindak pidana Narkoba haruslah dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya aparat Kepolisian, Kejaksaan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Hukuman kepada Pelaku tindak pidana Narkoba, sehubungan dengan hal tersebut maka Penulis akan melakukan Penelitian Proposal Skripsi dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.840/Pid.B/2012/PN.Mks).

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Penerapan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang dilakukan oleh Hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan sanksi hukuman kepada Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Putusan No.840/Pid.B/2012/PN.Mks.
2. Jenis-Jenis Sanksi apakah yang diterapkan hakim dalam perkara tindak pidana Narkotika Putusan No.840/Pid.B/2012/PN.Mks.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menentukan tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Penerapan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang dilakukan oleh Hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan sanksi

hukuman kepada Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Putusan No.840/Pid.B/2012/PN.Mks.

2. Untuk mengetahui Jenis-Jenis Sanksi apakah yang diterapkan hakim dalam perkara tindak pidana Narkotika. Putusan No.840/Pid.B/2012/PN.Mks.

b. Kegunaan Penelitian.

1. Kegunaan teoritis, yakni dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai narkotika dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa dalam penulisan-penulisan yang terkait dengan narkotika selanjutnya.
2. Kegunaan praktis, yakni berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian hukum khususnya mengenai penegakan hukum tindak pidana narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*". Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan istilah "delik", yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, delik didefinisikan sebagai berikut (Teguh Prasetyo, 2011: 47) :

"Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana."

Selanjutnya Pipin Syarifin (2000: 53) menguraikan beberapa pengertian tentang *strafbaar feit* melalui pendapat para ahli, yaitu seperti berikut:

- a. Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- b. Menurut Van Hamel, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*men selijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, bersifat melawan hukum, patut dipidana (*strafwaardig*), dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Pompe, *strafbaar feit* adalah *feit* yang ditentukan dalam *wet* sebagai *feit* yang *strafbaar* yang dapat dipidana.
- d. Menurut J.E. Jonkers, memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian berikut :
 - 1) Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

- 2) Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara Hazewinkel-Zuringa (Lamintang, 1997: 181), telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai berikut:

“Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.

Teguh Prasetyo (2011: 48-49) merumuskan istilah *strafbaar feit* berdasarkan pendapat para sarjana hukum, yaitu:

- a. Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia (baik aktif maupun pasif) yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.
- b. Wirjono Prodjodikoro pernah menggunakan istilah “peristiwa pidana”. Istilah ini secara resmi digunakan dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.
- c. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Istilah “tindak pidana” ini digunakan oleh Sudarto dan diikuti oleh Teguh Prasetyo.

Wirjono Prodjodikoro (2003: 1) juga menjelaskan tentang tindak pidana bahwa:

“Istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi sebagai hukum pidana”.

Bertolak dari berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum

dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan dalam hal ini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoretisi.

Adami Chazawi (2002: 79-81), merumuskan unsur-unsur tindak pidana dari berbagai pendapat para ahli hukum, seperti Moeljatno, Jonkers, dan Schravendijk.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan;
- 2) yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monoisme), dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Kelakuan (orang yang);
- 2) bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- 3) diancam dengan hukuman;
- 4) dilakukan oleh orang (yang dapat);
- 5) dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur-unsur tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut Lamintang (1997: 193-194), tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

- 3) macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) perasaan takut dan *stress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

B. Penyalahgunaan Narkotika.

1. Pengertian Penyalahgunaan

Istilah “penyalahgunaan” berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai berikut:

“proses, cara, perbuatan menyalahgunakan”

Sementara Salim dan Salim (1991:37) merumuskan

“ Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya “

2. Pengertian dan Penggolongan Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Smith Klise dan French Clinical Staff (Taufik Makarao, 2003:18) berpendapat sebagai berikut :

“Narcotics are drugs which produce insensibility stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).”

Dari kutipan di atas dapat diartikan bahwa narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintetis (meperidin, metadon).

Defenisi lain dari Biro bea Cukai Amerika Serikat dalam buku *“Narcotic Identification Manual”* sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Muchsin yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain. Dan termasuk juga narkotika sintetis

yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen* dan *Stimulant* (Taufik Makarao, 2003:18).

Berdasarkan dari defenisi tersebut di atas, M. Ridha Ma'ruf (Hari Sasangka, 2003: 33-34) menyatakan bahwa:

- a. Narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk narkotika alam adalah berbagai jenis candu morphine, heroin, ganja, hasish, codein dan cocain. Narkotika ala mini termasuk dalam arti sempit. Sedangkan narkotika sintesis yang termasuk di dalamnya termasuk zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu *hallucinogen*, *depressant* dan *stimulant*. Narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian secara luas.
- b. Narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan dan berbahaya apabila disalahgunakan.
- c. Narkotika dalam pengertian di sini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau *narcotic and dangerous drugs*.

Dalam ketentuan umum uu Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian narkotika adalah merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. (Edy Karsono, 2004:11)

Menurut *Verdoovende Miggelen Ordinantie Staatblad* 1972 No. 278 jo. No. 536 yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai undang-undang obat bius narkotika adalah “bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau yang dapat menurunkan kesadaran dan dapat menimbulkan gejala-gejala fisik dan

mental lainnya apabila dipakai secara terus-menerus dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan kepada bahan-bahan tersebut” (Taufik Makarao, 2003: 18-19).

Di dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum, yaitu:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

b. Penggolongan Narkotika

Di dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan mengenai penggolongan narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- c. Narkotika Golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika yang terbuat dari alam terdiri atas tiga bagian, yaitu kokain, ganja dan candu atau opium (Hari Sasangka, 2003: 35).

a. Kokain.

Kokain adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun *Erythroxylon Coca L.* Tanaman tersebut banyak tumbuh di Amerika Selatan di bagian barat ke utara lautan teduh. Kebanyakan ditanam dan tumbuh di dataran tinggi Andes Amerika Selatan khususnya di Peru dan Bolivia. Tumbuh juga di Ceylon, India dan Jawa. Di Pulau Jawa kadang-kadang ditanam dengan sengaja, tetapi sering tumbuh sebagai tanaman pagar (Hari Sasangka, 2003: 55).

Rasa bau daun *Erythroxylon Coca L.* seperti teh dan mengandung kokain. Daun tersebut sering dikunyah karena sedap rasanya dan seolah-olah menyegarkan badan. Sebenarnya dengan mengunyah daun tanaman tersebut dapat merusak paru-paru dan melunakkan saraf dan otot. Bunga *Erythroxylon Coca L.* selalu tersusun berganda lima pada ketiak daun serta berwarna putih.

Kokain yang dikenal selama ini pertama kali dibuat secara sintetis pada tahun 1855, dimana dampak yang ditimbulkan diakui dunia kedokteran. Sumber penggunaan kokain lainnya yang terkenal adalah *Coca Cola* yang diperkenalkan pertama kali oleh John Pombriton pada tahun 1886 yang dibuat dari sirup kokain dan

kafein. Namun karena tekanan publik, penggunaan kokain pada *Coca Cola* pada tahun 1903 dicabut.

Menurut Hari Sasangka (2003 : 58) dalam bidang ilmu kedokteran, kokain dipergunakan sebagian anastesi (pemati rasa) lokal:

- 1) Dalam pembedahan pada mata, hidung dan tenggorokan.
- 2) Menghilangkan rasa nyeri selaput landir dengan cara menyemburkan larutan kokain.
- 3) Menghilangkan rasa nyeri saat membersihkan dan menjahit luka dengan cara menyuntikkan kokain subkutan.
- 4) Menghilangkan rasa nyeri yang lebih luas dengan menyuntikkan kokain ke dalam ruang ekstradural bagian lumba, anastesi lumba.

b. Ganja.

Ganja berasal dari tanaman *Connabis* yang merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan istimewa. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang pohonnya cukup rimbun dan tumbuh subur di daerah tropis. Dapat ditanam dan tumbuh secara liar di semak belukar.

Nama samaran ganja banyak sekali, misalnya *Indian Hemp*, rumput barang, daun hijau, bangle, bunga, ikat, labang, jayus, jun. Remaja di Jakarta menyebutnya gelo dan cimeng. Di kalangan pecandu disebut *grass*, *marihuana*, *hasa*, *hasish*. Bagi pemakai sering dianggap sebagai lambang pergaulan sebab di dalam pemakaiannya hampir selalu beramai-ramai karena efek yang ditimbulkan oleh ganja adalah kegembiraan sehingga barang itu tidak mungkin dinikmati sendiri.

Adapun bentuk-bentuk ganja dibagi ke dalam 5 bentuk, yaitu:

- 1) Berbentuk rokok lintingan yang disebut *reefer*.
- 2) Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk dihisap seperti rokok.
- 3) Berbentuk campuran daun, tangkai dan biji untuk dihisap melalui hidung.

- 4) Berbentuk damma hasish berwarna coklat kehitam-hitaman seperti *mekjun* (Hari Sasangka, 2003: 50).

Bahaya dan akibat mengkonsumsi ganja dapat menimbulkan (Taufik Makarao, 2003: 32):

- 1) Kedua mata merah, mulut kering.
- 2) Banyak keringat, jantung berdebar.
- 3) Kecemasan dan kecurigaan yang berlebihan.
- 4) Denyut jantung bertambah cepat.
- 5) Nafsu makan bertambah.
- 6) Euforia, apatis, perasaan waktu berjalan lambat.

c. Candu.

Candu atau opium merupakan sumber utama dari narkotika alam. Berbagai narkotika berasal dari *alkoloida* candu, misalnya *morphine*, *heroin*, berasal dari tanaman *papaver somniferum* L. dan dari keluarga *papaveraceae*. Nama *papaver somniferum* merupakan sebutan yang diberikan oleh Linnaeus pada tahun 1753. Selain disebut dengan *papaver somniferum* juga disebut dengan *papaver nigrum* dan *pavot somnivere*.

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan tentang batasan-batasan candu yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Yang dimaksud dengan candu adalah:

- 1) Tanaman *papaver somniferum* L. dari semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri yang diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum* L. yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadan morfinnya.
- 3) Opium masak terdiri dari:
 - a) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian

- dengan atau tanpa penambahan-penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu abstrak yang cocok untuk pemadatan.
- b) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c) Jiciko, hasil yang diperoleh dengan pengolahan jicing.

Menurut Smite Kline (Hari Sasangka, 2003 : 41), gejala putus obat dari candu adalah sebagai berikut:

- 1) Gugup, cemas dan gelisah.
- 2) Kupil mengecil dan bulu roma berdiri.
- 3) Sering menguap, mata dan hidung berair, berkeringat.
- 4) Badan panas dingin, kaki dan punggung terasa sakit.
- 5) Diare, tidak dapat beristirahat dan mual-mual.
- 6) Berat badan dan nafsu makan berkurang, tidak bisa tidur.
- 7) Pernafasan bertambah kencang, temperatur dan tekanan darah bertambah.
- 8) Perasaan putus asa.
- 9)

Adapun dalam Pasal 153 sub b UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa :

Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Menurut penjelasan Pasal 153 sub b di atas, dapat dikatakan bahwa dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pula tentang jenis Psikotropika Golongan I dan II yang sudah dipindahkan kedalam Narkotika Golongan I.

Psikotropika Golongan I dan II dikategorikan dalam jenis *stimulansia*, yaitu (Hari Sasangka, 2003: 68):

Stimulansia, adalah obat-obat yang mengandung zat-zat yang merangsang otak dan syaraf. Obat-obat tersebut digunakan untuk meningkatkan daya konsentrasi dan aktivitas mental serta fisik. Obat-obat yang dimasukkan dalam golongan *stimulansia* adalah *Amphetamine* beserta turunan-turunannya. Dikalangan olahragawan ada yang dengan sembunyi-sembunyi mempergunakannya yang disebut dengan "*dopping*". *Stimulansia* disebut juga obat perangsang seks (*aphrodisia*) seperti yang di bayangkan oleh banyak orang. Jenis-jenis dari *stimulansia* ini seperti *amphetamine*, *ecstasy*, *metamfetamin* atau shabu dan sebagainya.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika.

Jenis-jenis tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut ini.

1. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

2. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika

Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli di sini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar narkotika.

3. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika

Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana bidang

pengangkutan narkoba yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Narkoba, berbunyi sebagai berikut:

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkoba
5. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkoba

Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkoba. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.

6. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi

Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkoba baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkoba (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 Undang-Undang Narkoba syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.

7. Tindak pidana yang menyangkut jalannya peradilan

Yang dimaksud dengan proses peradilan meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Dalam Undang-Undang Narkoba

perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit jalannya proses peradilan tersebut merupakan tindak pidana.

8. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika

Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam tindak pidana narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.

9. Tindak pidana yang menyangkut keterangan palsu

Sebelum seorang saksi memberikan keterangan di muka persidangan, maka saksi wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHP). Dengan cara yang demikian diharapkan saksi dalam memberikan keterangannya selalu konsekuen dengan sumpah yang diucapkannya.

Sejalan dengan hal tersebut , apabila dalam perkara narkotika saksi tidak memberikan keterangan dengan benar dapat menjadi tindak pidana.

10. Tindak pidana yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Lembaga-Lembaga yang diberi wewenanga oleh Undang-Undang Narkotika untuk memproduksi, menyalurkan atau menyerahkan narkotika yang ternyata melakukan kegiatan narkotika tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana ditetapkan undang-undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana.

11. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur

Tindak pidana dibidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana

C. Penyelidikan dan Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

a. Penyelidikan

Dalam KUHAP, pengertian penyelidikan terdapat dalam Pasal 1 angka 5, yaitu

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

b. Penyidikan

Dalam KUHAP, pengertian penyidikan terdapat dalam Pasal 1 angka 2, yaitu

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

2. Pihak yang Berwenang Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Pihak yang berwenang melakukan penyelidikan dan Penyidikan adalah pejabat Polri dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Pemberian wewenang ini dengan tetap memperhatikan fungsi koordinasi dengan penyidik dari Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang fungsinya sebagai pemegang utama wewenang dalam penyidikan tindak pidana.

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang narkoba menurut Pasal 82 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berwenang :

- a. Memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- b. Memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. Menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- h. Menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika, BNN (Badan Narkotika Nasional) juga memiliki wewenang. Dalam Pasal 75 UU No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa :

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional;
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

3. Polri Selaku Penyidik Tindak Pidana Narkotika

Kelahiran KUHAP merupakan era baru dalam dunia peradilan pidana di Indonesia. Selain sebagai produk hukum nasional yang menggantikan hukum ciptaan kolonial Belanda, KUHAP juga memberikan spesialisasi dalam perihal pelaksanaan dan pembagian tugas antara Kepolisian dan PPNS sebagai Penyidik, Jaksa sebagai Penuntut Umum, serta Hakim yang mengambil keputusan di Sidang Pengadilan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang mencakup koordinasi fungsional dan institusional, serta adanya sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, maka semakin tegas diatur tentang peranan Polri sebagai salah satu fungsi

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; penegakan hukum; perlindungan; pengayoman; dan pelayanan kepada masyarakat.

Pejabat polisi merupakan penyidik utama di dalam perkara- perkara

Pidana disamping penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil, hal ini telah diatur pada UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b. Dalam pada itu, untuk mendukung tugas Kepolisian sebagai penyidik, maka diatur pula di dalam KUHAP kewajiban dan wewenang Pejabat Polisi dalam kegiatan penyidikan. Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.

Dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1), karena kewajibannya penyidik memiliki wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13, menjelaskan bahwa kewajiban atau tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan kewajiban atau tugas pokok tersebut, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf g menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Mengenai wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1), yaitu:

- a. Menerima laporan dan/ atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam pelaksanaannya Pejabat Penyidik yang diemban oleh POLRI dikelompokkan menjadi dua, yakni Pejabat Penyidik Penuh dan Penyidik Pembantu.

PP. No. 58 Tahun 2010 Pasal 2A menjelaskan mengenai syarat kepangkatan dan pengangkatan Pejabat Polisi menjadi Pejabat Penyidik, yakni Pejabat Polisi tersebut harus:

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Sedangkan Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai Penyidik Pembantu diatur dalam PP. No. 58 Tahun 2010 Pasal 3. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Penyidik Pembantu adalah:

- a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Selain itu, penyidik polisi juga mempunyai wewenang untuk menjalankan fungsi kordinasi dan pengawasan terhadap penyidik PPNS sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2)

4. Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Narkoba, proses penyelidikan dan penyidikan yaitu sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Penyelidikan terhadap tindak pidana Narkoba melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyelidikan;

Persiapan penyelidikan meliputi:

1. Menginventarisir informasi yang bersumber antara lain media, masyarakat (informan), Daftar Pencarian Orang (DPO), Berita Acara Pemeriksaan, Daftar Pencarian Barang, dan sumber informasi lainnya;
2. Membuat Laporan Informasi yang dituangkan dalam format yang telah ditetapkan, diregistrasi, dan diajukan kepada pejabat yang berwenang untuk dianalisis;
3. Laporan informasi sebagaimana huruf b dibuat oleh Penyelidik,

4. Dalam hal Laporan Informasi mengandung kebenaran, pejabat melaporkan kepada atasannya secara berjenjang untuk ditindak lanjuti;
5. Atasan menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan; dan
6. Anggota yang mendapa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan membuat rencana kegiatan penyelidikan dan rencana kebutuhan anggaran.

b. Pelaksanaan & Metode Penyelidikan

Pelaksanaan penyelidikan, dilakukan sebagai berikut :

1. Paling sedikit oleh 2 (dua) anggota yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas Penyelidikan;
2. Metode yang digunakan, meliputi :
 - a. Pengamatan terhadap orang/sasaran/target, tempat dan barang (*observasi*);
 - b. Pembuntutan terhadap orang/sasaran/target (*surveillance*);
 - c. Penyamaran atau penyusupan yang dilakukan oleh petugas kedalam kelompok jarongan (*undercover*);
 - d. Penyamaran yang dilakukan oleh petugas untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*);

- e. Pembuntutan terhadap sasaran orang dan/atau barang yang akan diserahkan kepada pihak lain yang diduga sebagai bagian dari jaringan (*controlled delivery*); dan
- f. Penyadapan telepon yang dilakukan oleh petugas terhadap telepon sasaran (*phone intercept*).

- 3. Dalam hal melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik dilengkapi Surat Perintah Tugas yang berlaku paling lama 1 (satu) bulan.
- 4. Surat Perintah Tugas dapat digunakan untuk melakukan tindakan hukum/upaya paksa (Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan) dalam hal keadaan sangat perlu dan mendesak atau tertangkap tangan terhadap pelaku penyalahguna Narkoba, selanjutnya tindakan upaya paksa yang dilakukan, harus segera dilengkapi dengan administrasi penyidikan sebagaimana yang berlaku.

c. Pengakhiran

Pengakhiran penyelidikan, dilakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Melakukan gelar dalam rangka menganalisis hasil penyelidikan untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut;
- 2. Pelaksanaan gelar dilaksanakan oleh anggota yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas Penyelidikan dipimpin oleh atasan sesuai tingkat kesatuan masing-masing;

3. Membuat laporan hasil penyelidikan dan diajukan kepada pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas Penyelidikan;
4. Pejabat yang menerima laporan hasil penyelidikan agar menindaklanjuti :
 1. Apabila merupakan peristiwa tindak pidana Narkoba dan pelaku tertangkap, petugas yang menangkap segera membuat Laporan Polisi model A dan melengkapi administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan; dan
 2. Apabila bukan merupakan peristiwa tindak pidana Narkoba, penyelidikan ditutup dan jika ditemukan informasi baru, dapat dibuka kembali untuk dilakukan penyelidikan lanjutan.
5. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

2. Penyidikan

Proses penyidikan terhadap tindak pidana Narkoba meliputi tahap sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyidikan;

Persiapan penyidikan, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti Laporan Polisi hasil dari kegiatan penyelidikan dengan cara :

1. Menghimpun dan menginventarisir antara lain pelaku, barang bukti, Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan Saksi;
 2. Menyiapkan ruang pemeriksaan dan kelengkapan lainnya;
 3. Menunjuk dan membentuk tim/petugas penyidik/penyidik pembantu untuk menangani proses penyidikan;
 4. Menyiapkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan;
 5. Menyiapkan Surat Pemeriksaan Barang Bukti ke Laboratorium dan kelengkapan administrasi penyidikan lainnya.
2. Menyiapkan rencana penyidikan dan kebutuhan anggaran; dan
 3. Menyiapkan daftar pertanyaan untuk pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka.

b. Pelaksanaan Penyidikan;

Pelaksanaan penyidikan, dilakukan dengan memperhatikan sebagai berikut :

1. Laporan Polisi
 - a. Laporan Polisi dibuat dan ditanda tangani oleh petugas yang melaksanakan penyelidikan.
 - b. Laporan Polisi dilakukan dengan cara :

1. Mengisi format laporan, disertai penjelasan mengenai adanya tindak pidana Narkoba, TKP, identitas saksi/tersangka, pelapor, barang bukti, pasal yang dilanggar, uraian singkat kejadian, dan tindakan yang diambil;
 2. Memberi nomor dan dicatat dalam Buku Register Laporan Polisi (B-1) yang ada di Siaga Bareskrim Mabes Polri, atau SPK pada Polres/Ta/Tabes/Metro maupun Polsek;
- c. Laporan Polisi yang telah diberi nomor, diajukan kepada:
1. Direktur di tingkat Mabes Polri dan Polda
 2. Kasat Res Narkoba di tingkat Ka Polres/ Ta/Tabes/Metro
 3. Kapolsek di tingkat Polsek (Khusus Polsek Urban)
- d. Selanjutnya Laporan Polis dicatat dalam buku Register Kejahatan dan Pelanggaran (B-2). Serta diterbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan.

2. Pemanggilan

- a. Pemanggilan dilakukan apabila diperlukan keterangan terhadap saksi-saksi ahli melalui Surat Panggilan yang ditandatangani paling rendah oleh :
1. Kasubdit atas nama Direktur Tipid Narkoba pada tingkat Mabes Polri;
 2. Kasubdit atas nama Direktur Res Narkoba pada tingkat Polda;

3. Kasat Res Narkoba atas nama Ka Polres/Ta/Tabes/Metro dan
 4. Kapolsek pada tingkat Polsek (Khusus Polsek Urban).
- b. Surat Panggilan wajib di catat dalam Buku Register (B-4).
 - c. Dalam hal surat panggilan dikirim melalui Pos, harus dicatat di dalam buku ekspidisi.
 - d. Apabila yang dipanggil tidak ada di tempat, surat panggilan dapat diserahkan kepada keluarga, Ketua RT/RW. Atau Pamong Desa serta dicatat dalam buku ekspedisi.
 - e. Teknik / cara pemanggilan :
 1. Dalam hal memberikan surat panggilan, penyidik harus memperhatikan tenggang waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam harus sudah diterima ke alamat;
 2. Apabila panggilan tidak dipenuhi penyidik mengirim Surat Panggilan kedua dan dalam hal panggilan kedua tidak juga dipenuhi/ditolak, penyidik harus pro-aktif mendatangi saksi-saksi ahli yang mengambil keterangannya.
 3. Dalam hal pemanggilan terhadap tersangka, Surat Panggilan pertama tidak dipenuhi dengan alasan yang patut dan wajar, diterbitkan Surat Panggilan kedua disertai Surat Perintah Membawa.

3. Penangkapan

- a. Penangkapan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani pejabat paling rendah :
 - 1. Direktur Tipid Narkoba pada tingkat Mabes Polri;
 - 2. Direktur Res Narkoba pada tingkat Polda
 - 3. Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres/Ta/Tabes/Metro; dan
 - 4. Kapolsek pada tingkat Polsek (Khusus Polsek Urban)
- b. Surat Perintah Penangkapan wajib dicatat didalam Buku Register Surat Perintah Penangkapan (B-5);
- c. Petugas yang melaksanakan penangkapan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan;
- d. Petugas yang melaksanakan penangkapan wajib memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka serta tembusannya disampaikan kepada keluarganya setelah dilakukan penangkapan.
- e. Petugas yang melaksanakan penangkapan tanpa Surat Perintah Penangkapan.
- f. Setelah melaksanakan penangkapan, petugas wajib melaporkan kepada pejabat dan membuat Berita Acara Penangkapan.
- g. Teknik / cara penangkapan

1. Penangkapan dalam hal terkait dengan tindak pidana Narkoba, dapat diperpanjang selama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
 2. Perpanjangan penangkapan dituangkan ke dalam Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan.
 3. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dibuat dan ditandatangani oleh atasan pejabat dan dituangkan ke dalam Berita Acara Perpanjangan Penangkapan.
4. Pengeledahan
- a. Pengeledahan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Pengeledahan yang ditandatangani pejabat paling rendah oleh :
 1. Direktur Tipid Narkoba pada tingkat Mabes Polri;
 2. Direktur Res Narkoba pada tingkat Polda;
 3. Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres/Ta/Tabes/Metro dan
 4. Kapolsek pada tingkat Polsek (Khusus Polsek Urban).
 - b. Surat Perintah Pengeledahan wajib dicatat di dalam Buku Register Pengeledahan (B-6).
 - c. Petugas yang melaksanakan pengeledahan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Pengeledahan.

- d. Petugas yang melaksanakan penggeledahan wajib menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada tersangka atau keluarganya atau yang menguasai tempat tersebut.
- e. Petugas yang melaksanakan penggeledahan tanpa surat perintah penggeledahan, selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- f. Penggeledahan dilakukan terhadap :
 - 1. Badan;
 - 2. Rumah atau tempat tertutup lainnya;
 - 3. Kendaraan/benda bergerak lainnya;
 - 4. Pesawat udara; dan
 - 5. Kapal laut / kapal sungai.
- g. Teknik / cara penggeledahan

Dalam hal tersangka wanita yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba, penggeledahan badan, dilaksanakan oleh petugas wanita atau wanita yang ditunjuk oleh petugas:

 - 1. Dalam hal penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya dilaksanakan hanya untuk kepentingan penyidikan dan disaksikan oleh tersangka/pemilik rumah dan/atau saksi lain, pelaksanaannya harus dengan Surat Perintah Penggeledahan

dan selanjutnya dimintakan permohonan persetujuan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

2. Dalam hal tersangka atau pemilik rumah menolak atau tidak hadir, penggeledahan tetap dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan setempat dan/atau 2 (dua) orang saksi.
3. Penggeledahan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tanpa Surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Surat Perintah Penggeledahan.
4. Penggeledahan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dilakukan pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, tempat lain tersangka bertempat tinggal, di tempat tindak pidana dilakukan, penginapan, dan/atau tempat umum lainnya.
5. Setelah melakukan penggeledahan petugas segera mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
6. Dalam hal penggeledahan dilakukan terhadap kendaraan/benda bergerak lainnya petugas dapat segera melakukannya tanpa harus ada surat ijin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri setempat dan Surat Perintah Penggeledahan.

7. Setelah pelaksanaan penggeledahan dalam waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam, petugas harus segera membuat permohonan penetapan persetujuan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
8. Dalam hal penggeledahan terhadap pesawat udara, petugas yang akan melakukan penggeledahan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak pengelola bandara dan disaksikan oleh awak pesawat.
9. Penggeledahan terhadap Kapal Laut / Kapal sungai dilakukan setelah kapal sandar di pelabuhan dengan disaksikan oleh kapten kapal atau Anak Buah Kapal.
10. Dalam hal penggeledahan dilakukan terhadap Kapal Laut berbendera asing, petugas harus meminta izin pada Negara sesuai dengan bendera tersebut, dan pelaksanaan penggeledahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Setelah melakukan penggeledahan, petugas wajib melaporkan kepada pejabat yang menandatangani Surat Perintah Penggeledahan disertai Berita Acara Penggeledahan, selambat-lambatnya 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah penggeledahan selesai dilaksanakan.

12. Setelah melakukan penggeledahan, petugas wajib melaporkan kepada pejabat yang menandatangani Surat Perintah Penggeledahan disertai Berita Acara Penggeledahan, selambat-lambatnya 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah penggeledahan selesai dilaksanakan.
13. Guna kepentingan penyidikan dan membuat terang perkara, dalam setiap tahapan kegiatan penggeledahan dapat dilakukan dokumentasi.

5. Penyitaan

- a. Penyitaan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penyitaan yang ditandatangani oleh pejabat paling rendah:
 1. Direktur Tipid Narkoba pada tingkat Mabes Polri;
 2. Direktur Res Narkoba pada tingkat Polda;
 3. Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres/Ta/Tabes/Metro dan
 4. Kapolsek pada tingkat Polsek (Khusus Polsek Urban).
- b. Surat Perintah Penyitaan wajib dicatat di dalam Buku Register Penyitaan (B-7).
- c. Petugas yang melaksanakan penyitaan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penyitaan.

d. Petugas yang melaksanakan penyitaan wajib memperhatikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyitaan kepada tersangka atau keluarganya atau yang menguasai barang yang akan disita.

e. Jenis / macam penyitaan :

1. Benda atau barang yang dapat disita merupakan benda atau barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkoba.
2. Penyitaan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Surat Perintah Penyitaan.
3. Setelah melakukan penyitaan petugas segera mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri/ Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

f. Teknik / cara penyitaan

1. Dalam hal melakukan penyitaan, petugas meminta tersangka/orang yang menguasai barang untuk menghitung atau menimbang sendiri jumlah barang buktidengan diawasi dan difoto oleh petugas serta disaksikan oleh saksi lainnya.
2. Terhadap barang bukti Narkoba dilakukan pemeriksaan awal dengan menggunakan Test Kit / Narcotest.

3. Barang bukti yang telah dihitung atau ditimbang Selanjutnya dibungkus dan dikelompokkan oleh petugas berdasarkan jenisnya.
4. Dalam kegiatan penyitaan di TKP, petugas membuat surat tanda penerimaan terhadap benda / barang bukti yang disita.
5. Surat Tanda Penerimaan ditanda tangani oleh petugas yang melakukan penyitaan, pemilik/yang menguasai barang, dan saksi.
6. Surat tanda penerimaan salinannya diserahkan kepada pemilik/orang yang menguasai barang.
7. Terhadap barang yang disita namun tidak terkait dengan tindak pidana Narkoba, segera dikembalikan kepada pemiliknya dengan disertai surat tanda terima penyerahan barang yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, serta dibuatkan dalam Berita Acara Penyerahnan barang.
8. Setelah melakukan Penyitaan, petugas mengajukan permohonan persetujuan/penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri / Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
9. Mengajukan surat penetapan status barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

10. Petugas wajib melaporkan kepada pejabat yang menandatangani Surat Perintah Penyitaan) dan membuat Berita Acara Penyitaan.
11. Barang Bukti yang disita, diberi label dan disimpan dalam tempat penyimpanan barang bukti serta melaporkan kepada :
 - a. Direktur Tahti pada tingkat Mabes Polri;
 - b. Direktur Tahti pada tingkat Polda;
 - c. Kasi Tahti pada tingkat Polres/Ta/Tabes/Metro dan
 - d. Ba Tahti pada tingkat Polsek (khusus Polsek Urban).

6. Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan dilakukan secara langsung dan berhadap-hadapan antara diperiksa dengan pemeriksa.
- b. Pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka dan saksi/saksi ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- c. Berita Acara Pemeriksaan dibuat oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dan harus memenuhi persyaratan formil dan materiil yang ditentukan.
- d. Dalam hal proses pemeriksaan, penyidik/penyidik pembantu harus bersikap baik dan sopan serta dilarang menggunakan kekerasan / ancaman kekerasan.

- e. Dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
1. Pemeriksaan dilakukan sesegera mungkin atau paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam setelah ditangkap, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
 2. Penyidik wajib memberitahukan hak-hak tersangka, untuk didampingi oleh pengacara/penasehat hukum;
 3. Pemeriksaan dilakukan diruang pemeriksaan pada masing-masing kesatuan atau tempat lain yang ditunjuk oleh atasan penyidik sebagai ruang pemeriksaan;
 4. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan dibacakan kembali oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dihadapan tersangka dan setelah disetujui, kemudian ditanda tangani oleh tersangka, Penyidik/ Penyidik Pembantu yang memiliki Skep Penyidik/ Penyidik Pembantu, dan/atau penterjemah.
- f. Dalam hal tersangka tidak mempunyai penasehat hukum, penyidik/penyidik pembantu wajib menunjuk penasehat hukum dengan ketentuan sebagai berikut :
1. tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara 15 tahun atau lebih; dan

2. tersangka orang yang tidak mampu dan diancam pidana 5 tahun atau lebih

7. Penahanan

- a. Penahanan, dan permohonan perpanjangan penahanan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penahanan dan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan yang ditanda tangani oleh :
 1. Direktur Tipid Narkoba pada tingkat Mabes Polri ;
 2. Direktur Res Narkoba pada tingkat Polda ;
 3. Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres/Ta/Tabes/Metro dan
 4. Kapolsek pada tingkat polsek (khusus Polsek Urban)
- b. Surat perintah Penahanan wajib dicatat didalam buku register Penahanan (b-9)
- c. Penahanan tersangka harus dilakukan dalam ruang tahanan dan sebelum ditahan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis, difoto dan diambil sidik jarinya.
- d. Setelah pelaksanaan penahanan, penyidik/penyidik pembantu membuat Berita Acara Penahanan yang ditanda tangani oleh Penyidik/penyidik pembantu dan tersangka yang ditahan.
- e. Petugas yang melaksanakan penahanan wajib memberikan Surat Perintah penahanan kepada tersangka serta tembusannya disampaikan kepada keluarga tersangka.

- f. Penyampaian tembusan Surat Perintah Penahanan harus tercatat dibuku ekspedisi.
- g. Dalam hal penahanan dilakukan terhadap Warga Negara Asing, tembusan Surat Perintah Penahanan disampaikan kepada :
 - 1. Perwakilan/Kedutaan Besar/Konsulat Negara tersangka;
 - 2. Kabareskrim Polri; dan
 - 3. Sekretaris NXB Interpol Indonesia.
- h. Penangguhan penahanan
 - 1. Terhadap tersangka tindak pidana Narkoba yang memerlukan penangguhan penahanan, prosesnya dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan yang ditanda tangani paling rendah oleh :
 - a. Direktur Tipid Narkoba atas persetujuan Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes Polri; dan
 - b. Direktur Res Narkoba dan Kepala Satuan kewilayahan (kasatwil) atas persetujuan Kapolda pada tingkat Polda dan jajarannya.
 - 2. Persetujuan penangguhan penahanan dituangkan secara tertulis

8. Pembantaran

- a. Pembantaran dilakukan oleh penyidik apabila tersangka yang pada saat dilakukan penahanan, mengidap penyakit menular/membahayakan dan memerlukan perawatan khusus kerumah sakit rujukan berdasarkan rekomendasi dokter kepolisian.
- b. Dalam hal kesatuan pada tingkat polsek yang karena kondisi geografinya tidak memiliki dokter kepolisian, dapat menunjuk dokter setempat.
- c. Selama dalam status pembantaran, tersangka tetap dalam pengawasan penyidik/penyidik pembantu dan pengamanannya dapat dikoordinasikan dengan Dit/Sie/Ba Tahti.
- d. Apabila tersangka yang dibantar ternyata sembuh sesuai dengan diagnose dokter yang ditunjuk, penyidik membuat Surat Pencabutan Pembantaran dan penahanan dilanjutkan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Lanjutan.

9. Pengeluaran Tahanan

- a. Pengeluaran tahanan, dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan yang ditanda tangani paling rendah oleh
 - 1. Direktur Tipid Narkoba pada tingkat Mabes Polri;
 - 2. Direktur Res Narkoba pada tingkat Polda;
 - 3. Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres/Ta/Tabes/Metro dan
 - 4. Kapolsek pada tingkat Polsek (khusus Polsek Urban)

b. Pengeluaran tahanan dilakukan apabila :

1. Berkas Perkara dinyatakan lengkap dalam rangka penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum; dan
2. demi hukum karena masa waktu penahanan habis.

10. Gelar Perkara

a. Gelar perkara dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali terhadap seluruh kasus Narkoba yang disidik yaitu :

1. Gelar Perkara awal

Gelar perkara awal dilaksanakan paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam setelah tersangka ditangkap dan diterbitkan Laporan Polisi.

Gelar Perkara awal dihadiri oleh :

- a. Petugas penangkap;
- b. Penyidik/penyidik pembantu;
- c. Atasan penyidik;
- d. Pengawas Penyidik;
- e. Penyidik fungsional; dan
- f. Unsur internal Polri lain jika diperlukan (fungsi Propam, dan Binkum).

Materi gelar perkara awal meliputi :

1. Posisi kasus yang diperoleh dari hasil penyelidikan dan penangkapan tersangka;

2. Penerapan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan terkait dengan TKP, barang bukti, tersangka, dan saksi;
 3. Penentuan klasifikasi perkara dan target waktu penyelesaian berkas perkara tahap pertama pengiriman kepada Jaksa Penuntut Umum;
 4. Kendala/hambatan yang dihadapi penyidik; dan
 5. Rencana tindak lanjut.
2. Gelar perkara akhir.

Gelar perkara akhir dapat dilaksanakan 4 (empat) hari sebelum target waktu penyelesaian berkas perkara berakhir.

Gelar perkara akhir dihadiri oleh :

- a. Petugas penangkap;
- b. Penyidik;
- c. Atasan penyidik;
- d. Pengawas Penyidik;
- e. Penyidik fungsional; dan
- f. Unsur internal Polri lain jika diperlukan (fungsi Propam dan Binkum)

Materi gelar perkara akhir dihadiri oleh :

- a. Meneliti tindak lanjut hasil gelar perkara awal;
- b. Perkembangan pemenuhan penerapan unsure-unsur pasal;

- c. Perkembangan hasil pemeriksaan tersangka, saksi, dan barang bukti yang terkait dengan jaringan pelaku lainnya;
- d. Meneliti kelengkapan administrasi penyidikan dalam rangka pengiriman berkas perkara tahap satu kepada Jaksa Penuntut Umum;
 - 1. Kendala yang dihadapi; dan
 - 2. Rencana tindak lanjut.

Penanggung jawab pelaksanaan gelar perkara paling rendah adalah:

- 1. Dir Tipid Narkoba pada tingkat Mabes Polri;
- 2. Kabag Wassidik pada tingkat Polda;
- 3. Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres/Ta/Tabes/Metro dan
- 4. Kapolsek pada tingkat Polsek (khusus Polsek Urban)

Hasil gelar perkara, dituangkan dalam laporan notulen gelar perkara yang dilampirkan dengan daftar hadir peserta gelar perkara.

- 11. Pengawasan penyidikan;
 - a. Pengawas Penyidikan, dimulai sejak diterbitkan Laporan Polisi sampai dilimpahkannya berkas perkara, tersangka, dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum.
 - b. Pengawasan Penyidikan dilakukan oleh :
 - 1. Atasan penyidik; dan

2. Pengawas penyidik yang ditunjuk dengan Surat Perintah.
 - c. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, pengawas penyidikan melaporkan kepada atasan penyidik.
 - d. Tata cara pengawasan penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perkembangan hasil penyidikan;
- a. Perkembangan hasil penyidikan perkara dibuat dalam bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diberikan atas pengajuan keberatan/komplin secara tertulis dari orang/fihak yang berkepentingan.
 - b. SP2HP serendah-rendahnya ditandatangani oleh :
 1. subdit pada tingkat Mabes Polri;
 2. Kasubdit pada tingkat Polda;
 3. Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres/Ta/Tabes/Metro dan
 4. Kapolsek pada tingkat Polsek (Khusus Polsek Urban)
 - c. SP2HP berisi perkembangan hasil penyidikan sesuai dengan format yang telah ditentukan.
13. Penghentian penyidikan;
- a. Penghentian penyidikan, dilaksanakan setelah dilakukan gelar perkara disertai penertiban Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.

b. Penghentian penyidikan dilakukan apabila suatu perkara dinyatakan :

1. Tidak cukup bukti;
2. Bukan tindak pidana;
3. Tersangka meninggal dunia;
4. Kadaluarsa; atau
5. *Nebis in idem*.

c. Penyidik memberitahukan penghentian penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum, Tersangka, atau Keluarganya dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.

d. Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan ditandatangani oleh:

1. Direktur Tipid Narkoba pada tingkat Mabes Polri;
2. Direktur Res Narkoba pada tingkat Polda;
3. Kapolres/Ta/Tabes/Metro pada tingkat Polres /Polsek Urban

e. Apabila ditemukan bukti baru (*novum*) atau berdasarkan putusan pengadilan, diterbitkan Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan ditandatangani oleh pejabat.

14. Penyimpanan barang bukti Narkoba

a. Sebelum dilakukan penyimpanan, barang bukti Narkoba harus ditimbang, dihitung, dikelompokkan berdasarkan jenis, dibungkus,

dilak/disegel, dan difoto yang disaksikan oleh tersangka dan dituangkan dalam Berita Acara Penyimpanan.

- b. Setelah ditimbang, dihitung, dikelompokan berdasarkan jenis, dibungkus, dilak/disegel, dan difoto barang bukti Narkoba dicatat dalam buku register barang bukti (B-13) secara terperinci berdasarkan:
 - 1. Jenis satuan berat (Kg/Gr)
 - 2. Satuan volume (Liter/ml); dan
 - 3. Satuan jumlah (butir,buah,batang).
 - c. Kunci tempat penyimpanan barang bukti dipegang dan disimpan oleh petugas yang ditunjuk dengan Surat Perintah.
 - d. Barang bukti yang disimpan harus dilakukan pengecekan secara berkala, paling sedikit 2 (dua) minggu sekali oleh petugas dan dicatat dalam buku pengecekan barang bukti.
 - e. Dalam hal penanganan barang bukti lain yang terkait dengan tindak pidana Narkoba, penyimpanannya dilakukan ditempat yang ditentukan, dilabel, dan dicatat dalam buku register barang bukti serta diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pemusnahan barang bukti Narkoba.

- a. Pemusnahan barang bukti Narkoba, dilaksanakan setelah mendapat surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- b. Setelah mendapat surat penetapan diterbitkan Surat Perintah Pemusnahan yang ditandatangani oleh pejabat paling rendah :
 1. Direktur Tipid Narkoba pada tingkat Mabes Polri;
 2. Direktur Res Narkoba pada tingkat Polda;
 3. Kasat res Narkoba pada tingkat Polres/Ta/Tabes/Metro dan
 4. Kaposek pada tingkat Polsek (Khusus Polsek Urban)
- c. Sebelum pemusnahan dilaksanakan, supaya dilakukan pengetesan terhadap keaslian barang bukti.
- d. Proses pemusnahan barang bukti Narkoba dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Didahului dengan membuat rencana kegiatan pemusnahan dan rencana kebutuhan anggaran yang diajukan oleh penyidik kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker).
 2. Pemusnahan Narkoba dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, dilakukan oleh penyidik dengan disaksikan oleh pejabat yang mewakili instansi antara lain dari Kejaksaan, Departemen Kesehatan, Badan/Balai Pengawas Obat dan Makanan, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menguasai barang sitaan.

3. Terhadap barang bukti jenis tanaman Narkotika, paling lambat 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan di TKP, dilakukan pemusnahan setelah sebagian disisihkan terlebih dahulu untuk kepentingan penyidikan, ilmu pengetahuan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan tanpa harus ada penetapan dari pengadilan Negeri/Kejaksaan Negeri setempat.
 4. Untuk tanaman Narkoba yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit dijangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam lama 14 (empat belas) hari.
 5. Penentuan jumlah/prosentase barang bukti yang harus disisihkan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Terhadap barang bukti Narkotika bukan tanaman, precursor narkotika, psikotropika dan lainnya, pemusnahan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Penetapan Status Barang Sitaan untuk Dimusnahkan dan sebelumnya terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan penyidikan/pemeriksaan laboratorium.
- e. Setelah pelaksanaan pemusnahan, penyidik membuat Berita Acara Pemusnahan, yang sekurang-kurangnya memuat :
1. Nama, jenis, sifat dan jumlah;

2. Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan;
 3. Keterangan mengenai pemilik yang menguasai narkotika;
 4. Tandatangan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.
- f. Pengakhiran dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Pengiriman berkas perkara, barang bukti, dan tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap;
 2. Penghentian penyidikan; dan
 3. Mengarsipkan Berkas Perkara.

A. Proses Peradilan Pidana

1. Tahapan dalam perkara pidana

Tahap-tahap dalam perkara pidana menurut Poernomo (1985:21) ditinjau dari dua sudut yaitu:

Dari sudut pemeriksaan perkara dan sudut wewenang petugas penegak hukum, tahap perkara pidana ditinjau dari sudut pemeriksaan pidana dapat dibagi menjadi :

1. Pemeriksaan pendahuluan atau biasa disebut dengan istilah *vooronderzoek*, dan
2. Pemeriksaan akhir dalam sidang pengadilan yang juga disebut *aidondezek*.

Dalam pemeriksaan pendahuluan dapat dibagi lagi menjadi tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Sedangkan dalam pemeriksaan akhir adalah merupakan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Selanjutnya Poernomo (1985:22) : tahap perkara yang ditinjau dari pembagian kewenangan petugas penegak hukum dapat dibagi menjadi:

1. Tahap penyelidikan dan penyidikan.
2. Tahap penuntutan.
3. Tahap persidangan dan penentuan putusan hakim.
4. Tahap pelaksanaan eksekusi putusan hakim.

1. 1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Tindakan penyelidikan merupakan awal pemeriksaan perkara sebelum dilaksanakan penyidikan.

Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan sebuah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa penyelidikan dilaksanakan untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa, apakah merupakan perbuatan pidana atau bukan, apabila merupakan perbuatan pidana dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Arti penting tindakan penyidikan tersebut menurut Tanusoebroto (1983:12) adalah :

Merupakan hal yang penting dalam mencari kebenaran sejati tentang adanya persangkaan dilakukannya tindak pidana yang mempunyai arti penting dan mewarnai pemeriksaan di muka pengadilan serta pada gilirannya benar-benar mampu menetapkan mepidana (menghukum) si bersalah.

Pengertian penyidik menurut pasal 1 butir 1 KUHAP, adalah pejabat kepolisian negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 6 (1) KUHAP menentukan penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara RI (POLRI)
- b. Pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.

Selain penyidik dalam KUHAP dikenal pula penyidik pembantu. Ketentuan mengenai penyidik pembantu terdapat dalam pasal 1 butir 3 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polri yang diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP).

Berdasarkan ketentuan KUHAP mengenai penyidik dan penyidik pembantu tersebut, dapat diketahui bahwa untuk melaksanakan tugas penyidikan harus ada pemberian wewenang tersebut menurut Hamzah (1986:27) pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan tetapi berdasarkan atas pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya, dengan demikian

kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan kedudukan tingkat, kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik.

Pengertian Penyidikan terdapat dalam Pasal 1 angka 2 KUHP yakni:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dengan demikian penyidikan merupakan tindakan dari penyidik yang bertujuan untuk menemukan kebenaran materil sehingga perkara pidana tersebut menjadi jelas.

Apabila penyidikan telah selesai, maka penyidik wajib menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum. Menurut ketentuan pasal 110 (4) KUHP, penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

1. 2. Tahap Penuntutan.

Batasan Pengertian tentang Penuntutan terdapat dalam Pasal 1 angka 7 KUHP bunyi rumusannya adalah :

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Ketentuan tersebut di atas dapat dihubungkan dengan Pasal 13 KUHP yang menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 13 KUHAP tersebut, dapat disimpulkan bahwa penuntutan dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang disertai permintaan supaya perkara pidana itu diperiksa dan kemudian diputuskan oleh hakim dalam suatu sidang pengadilan.

Setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan, tindakan penuntut umum adalah meneruskan perkara tersebut dengan melakukan penuntutan namun dapat pula tidak meneruskan perkara tersebut.

Alasan penuntut umum tidak meneruskan suatu perkara adalah berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat 2 butir a KUHAP, yang menyebutkan bahwa penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Terhadap perkara yang dihentikan penuntutannya karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan merupakan tindak pidana, menurut pasal 140 ayat 2 butir a KUHAP, apabila kemudian ada alasan/ bukti baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap terdakwa.

Sedangkan terhadap perkara yang ditutup demi hukum tidak dapat diajukan lagi ke sidang pengadilan. Perkara-perkara yang ditutup demi hukum diatur dalam pasal 76 ayat 1, pasal 77 dan pasal 78 ayat 1 KUHP. Pasal 77 KUHP menyebutkan bahwa, kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia dan Pasal 78 ayat 1 KUHP menyebutkan, kewenangan menuntut hapus karena kadaluarsa.

Berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP tersebut perkara-perkara ditutup demi hukum adalah : Perkara yang telah diadili oleh hakim Indonesia dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. terdakwa telah meninggal dunia. Perkara yang telah memenuhi tenggang waktu daluarsa, hal ini yang menyebabkan perkara tidak diteruskan ke pengadilan. Sedangkan perkara dikesampingkan demi kepentingan umum tidak diajukan ke persidangan pengadilan dengan alasan apabila perkara tersebut diajukan ke pengadilan akan merugikan kepentingan umum atau negara sehingga akan lebih baik apabila perkara tersebut tidak dituntut.

Wewenang untuk menyampingkan perkara untuk kepentingan umum diatur dalam pasal 8 UU No. 15 tahun 1961 yang menyebutkan :

Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum.

Ketentuan lain mengenai hal itu tersebut adalah dalam penjelasan Pasal 77 KUHP yaitu:

Yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.

Apabila terdapat alasan untuk menghentikan perkara karena tidak cukup bukti/bukan perbuatan pidana atau karena perkara ditutup kepentingan umum, maka berarti penuntut umum tidak meneruskan perkara tersebut untuk diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Tindakan penuntutan meliputi tindakan penuntut umum melakukan tindakan pra penuntutan dan tindakan penuntutan.

Tindakan pra penuntutan adalah wewenang jaksa penuntut umum berdasarkan Pasal 14 butir b KUHP yaitu mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan

pada berkas hasil penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan penyidikan.

Isi dari ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan 4 KUHAP adalah :

Ayat 3.

Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum.

Ayat 4.

Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut menurut Poernomo (1985:24).

Pra penuntutan dapat diartikan sebagai penetapan Jaksa dalam jabatan Penuntut Umum yang mewajibkan kepada penyidik untuk melengkapi kekurangan hasil penyidikan atau melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang tersebut dalam penetapan.

Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan sudah cukup maka penuntut umum segera membuat surat dakwaan menurut Pasal 143 ayat 2 KUHAP. Surat dakwaan itu diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan.

Ayat 3 Pasal 143, menentukan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dalam ayat 2 huruf b batal demi hukum.

Terhadap ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP tersebut, menurut pendapat Bambang Poernomo (1995:38) :

Jika susunan surat tuduhan tidak jelas dan lengkap dianggap mengurangi hak terdakwa dalam pembelaan sehingga surat tuduhan tersebut memuat dakwaan yang samar-samar.

Dengan demikian agar surat-surat dakwaan tidak batal demi hukum, maka surat dakwaan harus memuat:

1. Identitas tersangka;
2. Uraian mengenai tindak pidana yang dituduhkan;
3. Waktu tindak pidana dilakukan;
4. Tempat tindak pidana.

Penuntut umum dalam menuntut beberapa perkara dapat mengadakan penggabungan perkara (*voeiging*) menjadi satu. Hal ini dapat dilakukan bila dalam waktu bersamaan menerima beberapa berkas perkara jika : (Marpaung, 1987:297): Beberapa tindakan tersebut dilakukan oleh seorang yang sama, beberapa tindak pidana (perkara) tersebut ada hubungannya, beberapa tindak pidana (perkara) tersebut bersangkut paut satu sama lain dan penggabungan perkara tersebut tidak merupakan halangan bagi pemeriksaan di persidangan .

Disamping terdapatnya kewenangan menggabungkan perkara pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 141 KUHAP terdapat pula kewenangan untuk menuntut secara terpisah satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa tersangka (*spiltsing*). Dalam praktek, umumnya penuntut umum melakukan *spiltsing* ini untuk menguatkan pembuktian dengan cara menjadikan tersangka yang satu menjadi saksi bagi tersangka lainnya (Marpaung, 1987:297).

Setelah surat dakwaan selesai dibuat, penuntut umum segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Menurut ketentuan Pasal 144 ayat (1) KUHAP penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. Pada ayat (2) ditentukan bahwa pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

1. 3. Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Masalah pembuktian merupakan bagian yang penting dalam proses peradilan baik perdata maupun pidana, khususnya mengenai peradilan pidana, masalah pembuktian berkaitan dengan tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari dan menemukan kebenaran materiil. Oleh karena itu masalah pembuktian ini penulis merasa perlu untuk memaparkan secara lebih rinci dan tersendiri meskipun sebenarnya merupakan bagian dalam tahap persidangan. Untuk membuktikan bersalah tidaknya seseorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di sidang

pengadilan, dalam hal pembuktian ini, hakim memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa (Prinst, 1998:132).

Menurut Poernomo (1985:24) hukum pembuktian adalah :

Keseluruhan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan.

Walaupun dalam pembuktian yang dicari adalah kebenaran materiil, akan tetapi kebenaran sejati tersebut terbatas pada kemampuan manusia, karena kebenaran yang mutlak hanyalah ada ditangan Tuhan.

Dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran materiil melalui pembuktian, dikenal beberapa sistem Pembuktian (Hamzah,1986:88).

Sistem pembuktian *posistif wettelijk*, yaitu pembuktian yang hanya didasarkan semata-mata pada alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti didakwakan kepadanya, tanpa memperhatikan ada atau tidaknya keyakinan hakim, sistem pembuktian *conviction raisonee* yaitu pembuktian yang didasarkan semata-mata atas keyakinan yang didasarkan pada pertimbangan akal dan hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan dalam undang-undang. Sistem pembuktian *conviction intime*, yaitu pembuktian yang didasarkan semata-mata atas keyakinan hakim belaka, tanpa terikat pada aturan-aturan, sehingga sangat tergantung pada subyek pribadi hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya. Sistem pembuktian *negatif wettelijk*, yaitu pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti yang ditetapkan dalam undang-undang dan terdapat keyakinan dari hakim terdakwa, apakah tindak pidana yang didakwakan benar-benar dilakukan oleh terdakwa atau tidak.

Sistem yang dianut Indonesia adalah *negatif wettelijk*, hal tersebut dapat diketahui dari ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No.14 Tahun 1970.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP, menyatakan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut Pasal 183 KUHAP tersebut, untuk dapat menjatuhkan pidana harus dipenuhi dua syarat yaitu:

- Sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti;
- Keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya dua bukti tersebut, bahwa perbuatan pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat bukti yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat bukti tersebut dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (Prinst, 1990:135)

Alat bukti yang dimaksud Pasal 183 KUHAP, yaitu terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,

e. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, ketentuan yang membuktikan bahwa Indonesia menganut sistem *negatif Wettelijk*, adalah Pasal 6 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan

1. Tiada seorang jua pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan baginya oleh undang-undang.
2. Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

a. Keterangan Saksi

Mengenai keterangan saksi diatur oleh Pasal 108, 116 s/d 165, 169, 170, 173, 174, 185, KUHAP. Dari pasal-pasal tersebut di atas, yang terutama diketahui adalah syarat orang dapat menjadi saksi.

Berdasarkan Pasal 185 KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di pengadilan. Namun demikian keterangan seorang saksi tidaklah cukup untuk sebuah pembuktian, sebagaimana yang ditegaskan Pasal 185 (2) KUHAP, bahawa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Pada umumnya, semua orang dapat jadi saksi. Keterangan saksi sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 184 (1) a KUHAP atau sebagai petunjuk sebagaimana

dimaksud Pasal 184 (1) d KUHP. Hal ini tercantum dalam Pasal 185 (7) KUHP, yang mengatur sebagai berikut :

Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti.

Dengan demikian dapat dipahami hal yang diatur oleh Pasal 171 KUHP, yang mengatur sebagai berikut :

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa disumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Demikian juga, orang-orang yang tercantum dalam Pasal 168 KUHP, yang mengatur :

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah samapai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudarah dari terdakwa atau bersama sebagai terdakwa, saudara, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa samapai derajat ketiga;
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selain dari orang yang belum dewasa, orang sakit ingatan atau sakit jiwa atau karena hubungan kekeluargaan, masih ada yang diizinkan dapat dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi yakni orang-orang yang tercantum dalam Pasal 170 KUHP, yakni :

1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat diminta dibebaskan dari kewajiban

untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya

2. Hakim menentukan sah atau tidaknya setelah alasan untuk permintaan tersebut.

Yang dimaksud dalam Pasal 170 (1) KUHAP adalah orang-orang antara lain dokter-dokter, pengacara-pengacara, notaris-notaris, pendeta-pendeta.

Menurut Tirtaamidjaja (Marpaung, 1992:34) :

Hak tersebut diberikan kepada mereka itu atas pertimbangan bahwa, kalau tidak demikian mereka itu akan dapat menyelenggarakan pekerjaannya dengan patut. Untuk melakukan pekerjaannya dengan sepatutnya maka orang-orang itu harus mendapat kepercayaan sepenuhnya dari orang-orang yang memerlukan pertolongannya dan kepercayaan ini hanya akan mereka berikan kalau mereka itu mempunyai keyakinan bahwa, pengacara, notaris, pendeta, dokter dan sebagainya tidak akan memberitahukan apa yang diketahuinya kepada pihak ketiga.

Sehubungan dengan mengenai apa saja yang dapat diterangkan oleh saksi dalam keterangannya. Hal ini secara tidak langsung terdapat dalam Pasal 108 (1) KUHAP, yakni orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana.

b. Keterangan Ahli.

Keterangan ahli dalam KUHAP diatur dalam Pasal 186 yang berbunyi:

Keterangan ahli ialah apa yang seseorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Dalam penjelasan resmi Pasal 186 KUHAP tercantum : Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk pelaporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Perlu diperhatikan pendapat Wirjono Projodikoro (Marpaung, 1992:37) antara lain :

Ada orang yang tidak membedakan sama sekali antara keterangan saksi dan keterangan ahli. Bahwa kalau diteliti betul, suatu keterangan seorang saksi, yang seharusnya hanya boleh mengandung suatu pengalaman (*Wearneming*) seharusnya hanya suatu kesimpulan (*conclusi*) hal mana masuk "keterangan ahli".

Pada KUHAP merupakan urutan kedua setelah sebagai alat bukti sah. Tetapi karena keyakinan hakim akhirnya yang menentukan maka pada hakekatnya tidak ada perbedaan.

c. Alat Bukti Surat

Surat sebagai alat bukti sah, diatur oleh Pasal 187 KUHAP yang berbunyi :

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, disebut atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu,
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dibuat oleh mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan tukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan,
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya,
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dapat diketahui bahwa butir a, termasuk berita acara pemeriksaan di tempat atau apa yang biasa disebut polisi dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Pada umumnya, surat yang dimaksud pada Pasal 187 KUHAP adalah surat yang termasuk akta-akta autentik yang tercantum pada Pasal 186 KUHAP yakni suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau

dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat di mana akta itu dibuatnya (Marpaung, 1992:39).

Misalnya akta notaris, putusan/penetapan hakim, berita-berita acara dan lain sebagainya.

d. Alat Bukti Petunjuk

Hal ini diatur dalam Pasal 88 KUHP yang berbunyi :

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Surat
 - c. Keterangan terdakwa
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Pasal 188 ayat (2) c tercantum keterangan terdakwa yang termasuk alat bukti sah sebagai petunjuk bukan sebagai keterangan terdakwa dimaksud Pasal 184 ayat (1) e. Dimaksudkan dalam hal ini adalah berkenaan dengan tanggapan terdakwa atas keterangan-keterangan saksi yang disumpah atau keterangan terdakwa atas

keterangan-keterangan saksi yang tidak disumpah atau keterangan terdakwa mengenai surat di bawah tangan.

Sehubungan dengan surat-surat di bawah tangan, oleh Marpaung (1992:40) menganggap sebagai surat yang tidak dijadikan tanda bukti yang menguntungkan.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP yang berbunyi :

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami;
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asal keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan karena disertai dengan alat bukti lain.

Jika disimak dengan cermat Pasal 189 ayat (2) KUHAP maka dapat ditafsirkan seolah-olah hakim di luar sidang mendengar keterangan terdakwa, pada hal yang dimaksudkan adalah keterangan para saksi baik saksi sebagai sebagai alat butki sah selaku petunjuk dipersidangan mengutarakan hal-hal yang didengar dari terdakwa di luar sidang (Marpaung, 1992:41).

Mengenai Pasal 189 ayat (3) KUHAP memang selayaknya demikian karena terdakwa tidak disumpah dan keterangannya dipertegas di sini, hanya untuk dirinya.

Perlu diperhatikan bahwa keterangan terdakwa benar-benar tuntas dalam arti tidak cukup umpamanya pengakuan atas perbuatan yang didakwakan melainkan segala keterangan mengenai perbuatan yang dilakukannya dan cara-cara melakukannya.

Pasal 189 ayat (4) KUHP, merupakan hal yang berlebihan karena pada Pasal 183 KUHP telah dicantumkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Bukanlah keterangan terdakwa saja hanya satu alat bukti sah (Marpaung, 1992:42).

Kelima pembuktian yang telah dipaparkan tersebut merupakan yang utama sejak penyidikan sampai pada saat pemeriksaan persidangan yang hasilnya adalah vonis atau putusan pengadilan. Hal ini terkait dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP tentang putusan antara lain merumuskan sebagai berikut :

Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Rumusan di atas pada hakekatnya mencakup pembuktian unsur-unsur delik serta perbuatan materiil yang dilakukan atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

1. 4. Tahap Persidangan dan Penentuan Putusan Hakim

Pada tahap ini merupakan tugas hakim hal tersebut dapat diketahui dari isi Pasal 1 butir 8 KUHP yang menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Kemudian pada Pasal 1 butir 9 KUHP disebutkan bahwa:

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan atas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian, menurut Pasal 1 butir 8 dan 9 KUHAP hakim adalah pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana dengan asas bebas, jujur dan tidak memihak pada suatu sidang pengadilan.

Untuk menguji hasil pemeriksaan pendahuluan agar diperoleh bahan final melalui pencocokan antara hal ikhwal yang dituduhkan dengan hal dari data-data atau fakta-fakta yang terungkap di muka sidang pengadilan. Bahan final yang diperoleh dari pemeriksaan sidang pengadilan akan menjadi dasar pertimbangan putusan pengadilan.

Pemeriksaan perkara pidana dalam sidang pengadilan dibedakan dalam tiga jenis acara pemeriksaan, yaitu :

1. Acara pemeriksaan biasa.
2. Acara pemeriksaan singkat.
3. Acara pemeriksaan cepat.

Acara pemeriksaan biasa adalah acara pemeriksaan dimana menurut pendapat penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya sulit.

Acara pemeriksaan singkat menurut Pasal 203 ayat (1) KUHAP adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 205 KUHAP

dan menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Acara pemeriksaan cepat dibagi menjadi dua, yakni acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Menurut Pasal 205 KUHP mengatur :

1. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
2. Dalam perkara bagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penuntut Umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan.

Perbedaan ketiga jenis pemeriksaan perkara tersebut apabila dikaitkan dengan tugas Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan maka pada acara singkat penuntut umum tidak membuat surat dakwaan kepada terdakwa, perbuatan mana yang didakwakan kepada terdakwa pada permulaan sidang dianggap sebagai surat dakwaan. Apabila dalam acara cepat, maka penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari setelah acara pemeriksaan selesai, menghadapkan terdakwa ke sidang pengadilan tanpa suatu surat dakwaan, sehingga batas tegas adalah pada acara pemeriksaan biasalah surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum.

Apabila pemeriksaan telah selesai maka kegiatan selanjutnya adalah musyawarah hakim untuk mengambil keputusan menurut Pasal 182 ayat (5) KUHP

dalam musyawarah tersebut hakim ketua mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim termuda sampai tertua, sedangkan mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Dalam hal mengemukakan pendapat didahulukan hakim yang lebih muda dahulu disusul oleh hakim yang lebih senior kemudian putusan diambil dengan musyawarah/suara terbanyak, jika hal ini tidak tercapai maka, putusan yang dipilih adalah putusan yang paling menguntungkan terdakwa.

Hasil musyawarah tersebut akan menghasilkan suatu putusan pengadilan, dimana menurut Pasal 1 butir 11 KUHP dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan.

Putusan pemidanaan dijatuhkan, menurut Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka pemidanaan terhadap terdakwa terjadi apabila berdasarkan penilaian hakim yang menerima perkara, atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat-alat pembuktian yang sah, pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Putusan bebas dijatuhkan, menurut Pasal 191 ayat (1) KUHP, adalah jika pengadilan berpendapat dari hasil sidang pemeriksaan, kesalahan terdakwa bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP maka terdakwa harus diputus bebas apabila dari pemeriksaan hakim, atas dasar pembuktian dengan

menggunakan alat-alat bukti yang sah, tidak terbukti kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan tidak ada keyakinan dari hakim bahwa terdakwa berbuat salah.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, walaupun perbuatan itu terbukti dilakukan terdakwa, akan tetapi perbuatan yang dilakukan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana.

Apabila putusan pengadilan berupa pemidanaan, maka segera setelah putusan tersebut diucapkan menurut ketentuan Pasal 193 ayat (3), hakim ketua sidang wajib memberitahukan terdakwa yaitu :

- a. Hak atas menerima atau segera menolak putusan;
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini;
- c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang untuk mengajukan grasi, dalam hal menerima putusan;
- d. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam hal ini ia menolak putusan;
- e. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini.

1. 5. Tahap Pelaksanaan Putusan

Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas ini adalah jaksa, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 270 KUHP, yaitu bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dilaksanakan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepada Jaksa untuk melaksanakan eksekusi atas putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tugas pelaksanaan eksekusi putusan hakim sebagai tahap akhir dalam perkara pidana dimaksudkan untuk melaksanakan putusan dalam arti terbatas hanya untuk tugas eksekusi jaksa oleh jaksa. Tugas pelaksanaan pidana sebagai akibat oleh putusan hakim ini berhubung adanya petugas-petugas pelaksana lainnya di luar kejaksaan, maka perlu dibedakan antara tugas eksekusi putusan hakim dan pelaksanaan pidana sebagai tindak lanjut dari eksekusi.

Yang dimaksud dengan pelaksanaan pidana sebagai tindak lanjut dari eksekusi, misalnya mengenai pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan, dan pengawasan dijalankan oleh hakim yang ditunjuk dalam waktu tertentu.

Dengan demikian pada tahap pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang merupakan tugas dari jaksa, hanya pada saat eksekusi putusan hakim tersebut dilaksanakan, sedangkan untuk pelaksanaan pidana sebagai tindak lanjut dari eksekusi putusan hakim, tidak lagi menjadi kewenangan jaksa.

Dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa, maka berdasarkan Pasal 277 ayat (1) KUHP hakim diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam

melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama dua tahun.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.

Penelitian merupakan hal terpenting dari seluruh rangkaian kegiatan penulisan suatu karya ilmiah, karena dengan penelitian akan terjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah. Dalam penulisan ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kepolisian Resort Kota Makassar, di Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang berasal dari wawancara dengan pihak penyidik, Jaksa, Hakim.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi dokumen yang dihimpun dari aturan undang-undang, buku-buku, arsip atau data di Kepolisian Resort Kota Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri

Makassar, serta bahan atau sumber lain yang menjadi faktor penunjang dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Studi Pustaka (*Library Research*).

Penelitian ini dilakukan dengan telaah pustaka, dengan cara data-data dikumpulkan dengan membaca literatur, surat kabar, hasil kajian, undang-undang yang akan dibahas ataupun melalui media elektronik yang ada sekarang ini.

2. Studi Lapangan (*field Research*).

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data langsung. studi lapangan ini dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- a) Dokumentasi, yaitu cara mendapatkan data yang sudah ada dan didokumentasikan pada instansi yang terkait.
- b) Wawancara, yaitu cara memperoleh data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada responden.

D. Analisis Data.

Seluruh data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Data tersebut kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini Penulis akan membahas dan mengomentari Putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap Pelaku tindak pidana Narkotika yakni Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.840/Pid.B/2012/PN.Mks. Tanggal 16 Agustus 2012, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

I. A. DUDUK PERKARA

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal tanggal 25 April 2012, Reg. Perk. NO: PDM- 284/Mks/Epo. 2/04/2012, yang isinya sebagai berikut:

PERTAMA.

Bahwa terdakwa LK. JHONNY PHIE ALIAS JHONNY pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekitar jam 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret tahun 2012, bertempat di rumah milik terdakwa sendiri yang terletak di Perumahan Permata sari V No.26 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih terletak dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, ***secara tanpa hak atau melawan hukum*** bertentangan dengan hak dan ketentuan perundang-undangan karena terdakwa bukan apoteker, atau badan atau instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan

serta tanpa izin dari menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Negara dan Pemerintah RI dan terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi, atau rumah sakit, atau lembaga penelitian dan pendidikan, ***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I hukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang mengandung Methamphetamine (MET) berdasarkan barang bukti yang ditemukan pada penguasaan diri Terdakwa Ik. **JHONNY PHIE ALIAS JHONNY** di rumah milik terdakwa sendiri yang terletak di Perumahan Permata sari V No.26 Kota Makassar yaitu masing-masing 5 (lima) sachet plastic berisikan sabu-sabu dengan total berat 176, 4822 gram, 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) butir tablet ecstasy warna pink dengan lambing "Star Cross" dengan beberapa barang bukti lain yaitu masing-masing 1 (satu) buah bong terbuat dari botol You C 1000, 1 (satu) botol kaca berisi alcohol, 1 (satu) kompor terbuat dari botol kaca kecil, 1 (satu) kotak berisi 2 (dua) pirex, 2 (dua) rol aluminium foil, 3 (tiga) sendok sabu-sabu terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) sendok plastik warna putih, 6 (enam) batang pirex terbuat dari kaca, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah brankas, 2 (dua) dos kecil, 1 (satu) plester atau isolasi bening dan timbangan yang oleh Hasil uji Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar yang dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 440/NNF/III/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar An. Dr. Nursamran Subandi, M.Si, Kombes POL. NRP. 62100814 tentang barang bukti yang ditemukan pada sachet plastic berisikan sabu-sabu dengan total

berat 176, 4822 gram dan 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) butir ecstasy warna pink dengan lambing "Star Cross" bahwa benar kesemuanya POSITIF mengandung methamphetamine (MET) dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 lampiran UU.RI.No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Negara dan Pemerintah RI dan terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi, atau rumah sakit, atau lembaga penelitian dan pendidikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA.

Bahwa Terdakwa Lk. JHONNY PHIE ALIAS JHONNY pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekitar jam 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret Tahun 2012, bertempat di rumah milik terdakwa sendiri iwr: eFEtak di Perumahan Permata Sari V No.26 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Makassar yang berwenang mengadili, ***secara tanpa hak atau melawan hukum*** bertentangan dengan hak dan ketentuan perundang-undangan karena terdakwa bukan apoteker, atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan RI atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Negara dan Pemerintahan RI dan terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi, atau rumah sakit, atau lembaga penelitian dan pendidikan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Yang mengandung Methamphetamine (MET) berdasarkan barang bukti yang ditemukan pada penguasaan diri Terdakwa Lk. JHONNY PHIE ALIAS JHONNY di rumah milik terdakwa sendiri yang di Perumahan Permata Sari V No. 26 Kota Makassar yaitu masing-masing 5 (lima) sachet plastic berisikan sabu-sabu dengan total berat 176, 4822 gram, 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) butir tablet ecstasy warna pink dengan lambang "Star Cross" dengan beberapa barang bukti lain yaitu masing-masing 1 (satu) kompor terbuat dari botol You C 1000, 1 (satu) botol kaca berisi alcohol, 1 (satu) kompor terbuat dari botol kaca kecil, 1 (satu) kotak berisi 2 (dua) pirex, 2 (dua) rol aluminium foil, 3 (tiga) sendok sabu-sabu terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) sendok plastik warna putih, 6 (enam) batang pirex terbuat dari kaca, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah brankas, 2 (dua) dos kecil, 1 (satu) plester atau isolasi bening dan timbangan yang oleh Hasil uji Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 440/NNF/III/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar An. Dr. Nursamran Subandi, M.Si, Kombes

POL. NRP. 62100814 tentang barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa Lk. JHONNY PHIE ALIAS JHONNY tersebut yaitu masing-masing 5 (lima) sachet plastic berisikan sabu-sabu dengan total berat 176, 4822 grarn dan 757 (tuiuh ratus lima puluh tujuh) butir tablet ekstasy warna pink dengan lambang "Star Cross" bahwa benar kesemuanya POSITIF mengandung Methamphethamine (MET) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU.RI.No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira jam 15.00 Wita, Saksi Lk. AKBAR JOHAR dan saksi Lk. FERI yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polrestabes Makassar mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa Lk. JHONNY PHIE ALIAS JHONNY yang bertempat tinggal di perumahan Permata Sari V No.26 Kota Makassar ada memiliki, meyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian untuk membuktikan informasi dari warga masyarakat tersebut, Saksi Lk. AKBAR JOHAR dan saksi Lk. FERI yang merupakan Anggota SAT Narkoba Polrestabes Makassar dibantu beberapa Anggota SAT Narkoba Polrestabes Makassar lainnya pada hari itu juga sekitar jam 16.00 wita langsung mendatangi dan menggeledah rumah milik Terdakwa Lk. JHONNY PHIE ALIAS JHONNY di Perumahan Permata Sari V No.26 Kota Makassar tersebut.

- Bahwa kemudian sambil memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa Lk. JHONNY PHIE ALIAS JHONNY, maka Saksi Lk. AKBAR JOHAR dan Saksi Lk. FERI yang merupakan Anggota SAT Narkoba Polrestabes Makassar dibantu beberapa Anggota SAT Narkoba Polrestabes Makassar lainnya mulai melakukan penggeledahan dirumah yang ditempati dan dihuni terdakwa tersebut dan disaat penggeledahan dilakukan ditemukanlah masing-masing 5 (lima) sachet plastic berisikan sabu-sabu dengan total berat 176, 4822 gram, 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) butir tablet ekstasy warna pink dengan lambang "Star Cross" dengan beberapa barang bukti lain yaitu masing-masing 1 (satu) buah bong terbuat dari botol You C 1000, 1 (satu) botol kaca berisi alkohol, 1 (satu) kompor terbuat dari botol kaca kecil , 1 (satu) kotak berisi 2 (dua) pirex, 2 (dua) rol aluminium foil, 3 (tiga) sendokisabu-sabu terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) sendok plastik warna putih, 6(enarn) batang pirex terbuat dari kaca, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah brangkas, 2 (dua) dos kecil, 1 (satu) plester atau isolasi bening dan tibanan di beberapa tempat terpisah yang ada di dalam rumah milik terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika ditanyakan oleh Saksi Lk. AKBAR JOHAR dan Saksi Lk. FERI tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasy serta alat-alat penggunaanya tersebut, Terdakwa Lk. JHONNY PHIE ALIAS JHONNY mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dan Pil Ekstasy serta alat-alat penggunaanya tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dari Lk. Suryo beralamat di Jakarta dengan cara dibeli.

- Bahwa kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya, maka Terdakwa Lk. JHONNY PHIE ALIAS JHONNY berikut barang bukti berupa masing-masing 5 (lima) sachet plastic berisikan sabu-sabu dengan total berat 176,4822 gram, 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) butir tablet ecstasy warna pink dengan lambing "Star Cross" dengan beberapa barang bukti lain yaitu masing-masing 1 (satu) buah bong terbuat dari botol You C 1000, 1 (satu) botol kaca berisi alkohol, 1 (satu) kompor terbuat dari botol kaca kecil, 1 (satu) kotak berisi 2 (dua) pirex, 2 (dua) rol aluminium foil, 3 (tiga) sendok sabu-sabu terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) sendok plastic warna putih, 6 (enam) batang pirex terbuat dari kaca, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah brankas, 2 (dua) dos kecil, 1 (satu) plester atau isolasi bening dan timbangan yang ditemukan di dalam rumah milik terdakwa tersebut dibawa oleh Saksi Lk. AKBAR JOHAR dan Saksi Lk. FERI dibantu beberapa Anggota Sat Narkoba Polrestabes Makassar lainnya ke Mapolrestabes Makassar.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan Hasil Uji Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 440/NNF/III/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar An. Dr. Nursamran Subandi, M.Si, Kombes Pol. NRP. 62100814 tentang barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa Lk. JHONNY PHIE ALIAS JHONNY tersebut yaitu masing-masing 5 (lima) sachet plastic berisikan sabu-sabu dengan total berat 176, 4822 gram dan 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) butir tablet ecstasy warna pink dengan lambang "Star Cross" bahwa benar kesemuanya POSITIF

mengandung Methamphetamine (MET) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Negara dan Pemerintah RI terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi, atau rumah sakit atau lembaga penelitian dan pendidikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa Lk.JHONNY PHIE ALIAS JHONNY pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira jam 16.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret Tahun 2012, bertempat di rumah milik terdakwa sendiri yang terletak di Perumahan Permata sari V No.26 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, **menyalahgunakan** bertentangan dengan hak dan ketentuan perundang-undangan karena terdakwa bukan apoteker, atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan serta tanpa izin dari Menteri

Kesehatan RI atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Negara dan pemerintahan RI dan terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi, atau rumah sakit, atau lembaga penelitian dan pendidikan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Methamphethamine (MET) berdasarkan barang bukti yang ditemukan pada penguasaan diri Terdakwa Lk. JHONNY PHIE ALIAS JHONNY dirumah milik terdakwa sendiri yang terletak di Perumahan Permata sari V No.26 Kota Makassar yaitu masing-masing 5 (lima) sachet plastik berisikan sabu-sabu dengan total berat 176, 4822 gram, 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) butir tablet ekstasi warna pink dengan lambang "Star CroSS" dengan beberapa barang bukti lain yaitu masing-masing 1 (satu) kompor terbuat dari botol You c 1000, 1 (satu) botol kaca berisi alcohol, 1 (satu) kompor terbuat dari botol kaca kecil, 1 (satu) kotak berisi 2 (dua) pirex, 2 (dua) rol aluminium foil, 3 (tiga) sendok sabu-sabu terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) sendok plastik warna putih, 6 (enam) batang pirex terbuat dari kaca, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah brankas, 2 (dua) dos kecil, 1 (satu) plester atau isolasi bening dan timbangan yang oleh Hasil Uji Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 440/NNF/III/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar An. Dr. Nursamran Subandi, M.Si, Kombes POL. NRP. 62100814 tentang barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa Lk. JHONNY PHIE ALIAS JHONNY bagi dirinya sendiri bahwa benar terdakwa telah menggunakan sabu-sabu yang mengandung Methamphethamine (MET) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran

UU.RI.No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira jam 15.00 Wita, Saksi Lk. AKBAR JOHAR dan saksi Lk. FERI yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polrestabes Makassar mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa Lk. JHONNY PHIE ALIAS JHONNY yang bertempat tinggal di Perumahan Permata Sari V No.26 Kota Makassar ada memiliki, meyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian untuk membuktikan informasi dari warga masyarakat tersebut, Saksi Lk. AKBAR JOHAR dan saksi Lk. FERI yang merupakan ,Anggota SAT Narkoba Polrestabes Makassar dibantu beberapa Anggota SAT Narkoba Polrestabes Makassar lainnya pada hari itu juga sekitar jam 16.00 wita langsung mendatangi dan menggeledah rumah milik Terdakwa Lk. JHONNY PHIE ALIAS JHONNY di Perumahan Permata Sari V No.26 Kota Makassar tersebut.
- Bahwa kemudian sambil memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa Lk. JHONNY PHIE ALIAS JHONNY, maka Saksi Lk. AKBAR JOHAR dan Saksi Lk. FERI yang merupakan Anggota SAT Narkoba Polrestabes Makassar dibantu beberapa Anggota SAT Narkoba Polrestabes Makassar lainnya mulai melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati dan dihuni terdakwa tersebut dan disaat penggeledahan dilakukan ditemukanlah masing-masing 5 (lima) sachet plastic

berisikan sabu-sabu dengan total berat 176, 4822 gram, 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) butir tablet ekstasy warna pink dengan lambang "Star Cross" dengan beberapa barang bukti lain yaitu masing-masing 1 (satu) buah bong terbuat dari botol you C 1000, 1 (satu) botol kaca berisi alkohol, 1 (satu) kompor terbuat dari botol kaca kecil , 1 (satu) kotak berisi 2 (dua) pirex, 2 (dua) rol aluminium foil, 3 (tiga) sendok sabu-sabu terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) sendok plastik warna putih, 6 (enam) batang pirex terbuat dari kaca, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah brangkas, 2 (dua) dos kecil, 1 (satu) plester atau isolasi bening dan timbangan di beberapa tempat terpisah yang ada di dalam rumah milik terdakwa tersebut;

- Bahwa ketika ditanyakan oleh Saksi Lk. AKBAR JOHAR dan Saksi Lk. FERi tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasy serta alat-alat penggunaanya tersebut, Terdakwa Lk. JHONNY PHIE ALIAS JHONNY mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dan Pil Ekstasy serta alat-alat penggunaanya tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dari Lk. Suryo beralamat di Jakarta dengan cara dibeli.
- Bahwa kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya, maka Terdakwa Lk. JHONNY PHIE ALIAS JHONNY berikut barang bukti berupa masing-masing 5 (lima) sachet plastic berisikan sabu-sabu dengan total berat 176, 4822 gram, 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) butir tablet ecstasy warna pink dengan lambing "Star Cross" dengan beberapa barang bukti lain yaitu masing-masing 1 (satu) buah bong terbuat dari botol You C 1000, 1 (satu) botol kaca berisi alkohol, 1 (satu) kompor terbuat dari botol kaca kecil, 1 (satu) kotak berisi 2 (dua) pirex, 2 (dua) rol

aluminium foil, 3 (tiga) sendok sabu-sabu terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) sendok plastic warna putih, 6 (enam) batang pirex terbuat dari kaca, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah brankas, 2 (dua) dos kecil, 1 (satu) plester atau isolasi bening dan timbangan yang ditemukan di dalam rumah milik terdakwa tersebut dibawa oleh Saksi Lk. AKBAR JOHAR dan Saksi Lk. FERI dibantu beberapa Anggota Sat Narkoba Polrestabes Makassar lainnya ke Mapolrestabes Makassar.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan Hasil Uji Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 440/NNF/III/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar An. Dr. Nursamran Subandi, M.Si, Kombes Pol. NRP. 62100814 tentang barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa Lk. JHONNY PHIE ALIAS JHONNY tersebut yaitu masing-masing 5 (lima) sachet plastic berisikan sabu-sabu dengan total berat 176, 4822 gram dan 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) butir tablet ecstasy warna pink, dengan lambing "Star Cross" bahwa benar kesemuanya POSITIF mengandung Methamphetamine (MET) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Negara dan Pemerintah RI terdakwa bukanlah pedagang besar

farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi, atau rumah sakit, atau lembaga penelitian dan pendidikan ;

B. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah mernenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI NO: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu; atau Pasal 112 ayat (2) UU RI NO: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua, atau Pasa 127 ayat (1) huruf a UU NO: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun **secara Alternatif**, rnaka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang paling relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan Ketiga, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menurut hemat Majelis mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**" ;
2. Unsur "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

Ad. 1. Unsur "**Setiap Orang**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap Orang" adalah setiap orang atau Badan Hukum selaku subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak berada atau digantungkan pada suatu kedudukan atau kualitas tertentu ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis, Terdakwa adalah termasuk dalam kategori sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ad 1. "setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan tentang keberadaan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah brankas beserta isinya berupa beberapa paket shabu-shabu dan pil ekstasi beserta kelengkapan untuk rnengkonsumsi Narkotika dan 1 (satu) buah timbangan, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bawa terdakwa tidak tah menahu tentang Barang Bukti brankas dan isinya tersebut dan menyatakan bahwa barang tersebut adalah milik Suryo, dan kedatangan

terdakwa ditempat itu adalah untuk membeli shabu-shabu dan pil ekstasi untuk terdakwa konsumsi sendiri yang kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian di saku celana terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap terdakwa dan Barang Bukti berupa brankas beserta isinya tersebut, tidak ditemukan adanya hubungan timbal balik, baik menyangkut kepemilikan maupun terhadap peran atau pengetahuan terdakwa terhadap Barang Bukti tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis tersebut, didasarkan pada adanya fakta yang terungkap dipersidangan, yakni keterangan saksi-saksi dari petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni saksi AKBAR JOHAN dan saksi FERI yang pada pokoknya bahwa target penangkapan yang dilakukan, oleh oleh petugas kepolisian, sebenarnya bukan terhadap terdakwa, tetapi terhadap target penangkapan yang bernama Suryo, namun pada saat petugas kepolisian melakukan pengepungan dan penggerebekan di tempat kejadian, Suryo yang merupakan target penangkapan berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumah, sehingga petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sementara keluar dari rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa hal yang diuraikan tersebut, bersesuaian dengan keterangan saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa yakni saksi JHON CIPUTRA yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah yang terletak di Perumahan Permata sari V No. 26 Makassar, tempat terdakwa ditangkap adalah

rumah milik saksi yang saksi kontrakkan kepada Suryo, dengan masa kontrak selama 1 (satu) tahun, sejak bulan Januari 2012 dan harga kontraknya sudah dibayar lunas oleh Suryo, sehingga saksi tidak mengetahui apa keperluan terdakwa ke rumah tersebut dan tidak mengetahui hubungannya dengan Suryo, karena sepengetahuan saksi rumah terdakwa berada di perumahan Tanjung Bunga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa Barang Bukti yang ada sangkut pautnya dengan terdakwa adalah barang Bukti berupa shabu-shabu seberat 3, 69 gram dan beberapa pil ekstasi yang ditemukan oleh Polisi dalam saku celana terdakwa pada saat terdakwa baru saja membeli shabu-shabu tersebut dari Suryo yang dimaksudkan untuk digunakan sendiri oleh terdakwa dan saat keluar dari rumah terdakwa ditangkap oleh polisi sementara Suryo berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar NO. Lab : 440/NNF/III/2012, tertanggal 29 Maret 2012, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang Bukti berupa Kristal bening tersebut adalah shabu-shabu dan hasil tes urine terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina (MET) dan terdaftar dalam Narkotika. Golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang.undang Nornor 35mTahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas adalah bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya bahwa tujuan terdakwa ke rumah tersebut adalah untuk membeli shabu-shabu karena terdakwa memang sudah menggunakan Narkotika sudah lebih dari 10 tahun dan kalau tidak menggunakan Narkotika, terdakwa tidak bisa bekerja dan selama berada dalam tahanan, terdakwa selalu menggunakan obat penenang dan selama menggunakan Narkotika, terdakwa tidak pernah ada memiliki izin dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tindakan terdakwa adalah termasuk dalam pengertian "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sehingga dengan demikian unsur ad 2 dalam dakwaan ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Ketiga ini telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, justru Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwalah pelaku dari tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kadar kesalahannya dan dibebani pula membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sedangkan menyangkut adanya permintaan terdakwa agar diberi kesempatan untuk mengikuti Rehabilitasi untuk menghilangkan atau menyembuhkan ketergantungannya terhadap Narkotika, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat kaidah hukum yang pada pokoknya berisi kewajiban untuk memerintahkan kepada terdakwa yang telah dinyatakan menyalahgunakan atau korban penyalahgunaan Narkotika, untuk mengikuti Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, untuk menyembuhkan atau menghilangkan ketergantungannya terhadap Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yang dihubungkan dengan Surat Keterangan Dokter "POLIKLINIK RUTAN" Makassar, tertanggal 2 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. St Wahidah Ramli, M. Kes. Sp.Kj. yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan adanya gangguan mental dan gangguan perilaku akibat penggunaan zat yang dialami oleh terdakwa, maka dengan demikian sebagai upaya untuk menyelamatkan dan menyembuhkan terdakwa dari ketergantungan Narkotika, maka adalah berdasar hukum jika permohonan terdakwa dikabulkan, dan untuk itu adalah berdasar jika terdakwa diperintahkan untuk mengikuti Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa mengenai tempat pelaksanaan Rehabilitasi tersebut, maka Majelis mengacu pada Surat Permohonan yang diajukan oleh keluarga (saudara kandung) terdakwa atas nama VINCENT PHILIP tertanggal 08 Agustus 2012, yang

pada pokoknya bermohon bahwa untuk kemudahan pelaksanaan dan komunikasi terdakwa dan keluarga selama menjalani Rehabilitasi, maka sedapat mungkin Rehabilitasi Medis dan Sosial untuk terdakwa dilaksanakan pada Rumah Sakit dr. Sutomo, Up. Bagian Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Surabaya, dengan pertimbangan bahwa sebahagian besar keluarga terdakwa berdomisili di Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permintaan dari keluarga terdakwa tersebut adalah beralasan sehingga Majelis akan menetapkan bahwa pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi terdakwa dilaksanakan pada Rumah Sakit dr. Sutomo, Up. Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Surabaya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka untuk kepentingan pelaksanaan Rehabilitasi tersebut, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan, dengan ketentuan masa penahanan dan masa mengikuti Rehabilitasi Medis dan Sosial atas diri terdakwa akan dikurangkan/diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan, yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat 152,65 gram;

- 1 (satu) sachet plastik Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3, 69 gram yang ditemukan dari celana yang dipakai terdakwa JHONNY PHIE Alias JHONNY;
- 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) butir tablet ecstasy warna pink dengan lambing “star cross”;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol You C 1000;
- 1 (satu) buah botol kaca berisi alkohol;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca kecil;
- 1 (satu) buah kotak berisi 2 (dua) buah pireks;
- 2 (dua) rol aluminium foil;
- 3 (tiga) buah sendok shabu-shabu terbuat dari pipet plastik;
- 2 (dua) sendok plastik warna putih;
- 6 (enam) batang pireks terbuat dari kaca;
- 3 (tiga) korek api gas;
- 1 (satu) buah brankas besi;
- 2 (dua) dos kecil;
- 1 (satu) plaster atau isolasi bening dan timbangan ;

Setelah Majelis mencermatinya, Barang Bukti tersebut adalah termasuk Narkotika beserta perlengkapannya dalam hal penyalahgunaannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Tindakan terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi generasi muda dan kepada terdakwa sendiri ;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan yang dalam serta berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Terdakwa menunjukkan keinginan yang kuat untuk menghilangkan atau menyembuhkan dirinya dari ketergantungan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis hukuman yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan undang-undang serta peraturan lainnya Yang bersangkutan:

C. PUTUSAN HAKIM

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JHONNY PHIE Alias JHONNY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JHONNY PHIE Alias JHONNY oleh karena itu, dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun,;
3. Memerintahkan agar terdakwa mengikuti Rehabilitas Medis dan Sosial pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sutorno, up. Bagian Rehabilitasi Medis dan Sosial di Surabaya;
4. Menetapkan masa penahanan dan masa mengikuti Rehabilitasi Medis dan Sosial atas diri terdakwa akan dikurangkan/diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Makassar guna menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat 152,65 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3, 69 gram yang ditemukan dari celana yang dipakai terdakwa JHONNy PHIE Alias JHONNY;
 - 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) butir tablet ekstasi warna pink dengan lambang "star cross";
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol you C 1000;
 - 1 (satu) buah botol kaca berisi alkohol;

- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca kecil ;
- 1 (satu) buah kotak berisi 2 (dua) buah pireks ;
- 2 (dua) rol aluminium foil ;
- 3 (tiga) buah sendok shabu-shabu terbuat dari pipet ptastik;
- 2 (dua) sendok plastik warna putih ;
- 6 (enam) batang pireks terbuat dari kaca ;
- 3 (tiga) korek api gas ;
- 1 (satu) buah brankas besi;
- 2 (dua) dos kecil;
- 1 (satu) plaster atau isolasi bening dan timbangan ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani mernbayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 oleh MAKMUR, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BONTOR AROEN, SH.MH. dan ARIE WINARSIH, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh DERMAWAN TAHIR, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh ZAINAL ABIDIN, SH. Jaksa Penuntut Umum.

D. PEMBAHASAN/KOMENTAR PENULIS

Bahwa dengan memperhatikan kasus tersebut di atas serta alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan No.840/Pid.B/2012/PN.Mks tanggal 16 Agustus 2012, yang dikuatkan Oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.340/PID.SUS/2012/PT.MKS, tanggal 09 Nopember 2012, dalam perkara tindak pidana Narkotika an.Terdakwa JHONNY PHIE alias JHONNY, maka Penulis dapat mengemukakan Pendapat/Komentar sebagai berikut :

1.Penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menilai bahwa diantara 3 (tiga) Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka yang terbukti didepan persidangan adalah Dakwaan Ketiga yakni Dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena memang unsur-unsur dari pasal inilah yang terbukti sebagai fakta didepan Persidangan Pengadilan, sehingga tepatlah Amar/Isi Putusan Majelis Hakim yang Menyatakan terdakwa **JHONNY PHIE Alias JHONNY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

2.Penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JHONNY PHIE Alias JHONNY oleh karena itu,dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun, meskipun Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim lebih ringan dari Tuntutan Jaksa, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman 12 (dua belas

tahun), Penulis sependapat dengan Majelis Hakim oleh karena Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa Melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, MEMILIKI MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM TANPA HAK, tidaklah terbukti, yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI.

3. Penulis Menilai Putusan Majelis Hakim, dalam perkara ini yang mengabulkan, permintaan terdakwa agar diberi kesempatan untuk mengikuti Rehabilitasi untuk menghilangkan atau menyembuhkan ketergantungannya terhadap Narkotika, berdasarkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat kaidah hukum yang pada pokoknya berisi kewajiban untuk memerintahkan kepada terdakwa yang telah dinyatakan menyalahgunakan atau korban penyalahgunaan Narkotika, untuk mengikuti Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, untuk menyembuhkan atau menghilangkan ketergantungannya terhadap Narkotika, sudah tepat dan benar penerapan hukumnya sesuai dengan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim dalam perkara ini sungguh-sungguh memahami dan menjiwai bahwa sesungguhnya orang-orang yang terlibat selaku Pelaku tindak pidana narkotika

seringkali adalah korban peredaran ilegal dan penyalahgunaan Narkotika, dan sebagai orang sakit yang mengalami ketergantungan memang sangat membutuhkan mengikuti Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, untuk menyembuhkan atau menghilangkan ketergantungannya terhadap Narkotika.

4.Putusan Majelis Hakim, dalam perkara ini Menetapkan pula, agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Makassar guna menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut;

BAB V

PENUTUP

A.KESIMPULAN

1.Penerapan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang dilakukan oleh Hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan sanksi hukuman kepada Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Putusan No.840/Pid.B/2012/PN.Mks, telah sesuai dengan Undang-Undang, disamping menjatuhkan sanksi pidana juga memutuskan memberi kesempatan untuk mengikuti Rehabilitasi untuk menghilangkan atau menyembuhkan ketergantungannya terhadap Narkotika, berdasarkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Jenis-Jenis Sanksi yang diterapkan hakim dalam perkara tindak pidana Narkotika adalah Pidana Penjara, Pidana Denda, Perintah Mewajibkan Terdakwa agar menjalani dan mengikuti Rehabilitasi untuk menghilangkan atau menyembuhkan ketergantungannya terhadap Narkotika, berdasarkan Pasal 127 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan khususnya dalam Putusan No.840/Pid.B/2012/PN.Mks. yang dijatuhkan atau diterapkan adalah Pidana Penjara dan kewajiban mengikuti Rehabilitasi.

B.SARAN

1.Diperlukan Sosialisasi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, agar masyarakat luas memahami, bahwa dalam undang-undang ini bukan hanya mengenal sanksi pidana, sanksi denda, tetapi juga mengenal bahwa Hakim dapat memerintahkan, mewajibkan untuk mengikuti Rehabilitasi untuk menghilangkan atau menyembuhkan ketergantungannya terhadap Narkotika, berdasarkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.Disarankan kepada Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika, memperhatikan bahwa Terdakwa sesungguhnya juga adalah merupakan Korban Peredaran Illegal dan Penyalahgunaan Narkotika sehingga perlu direhabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrasjid, Chainur. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. PT.Sinar Grafika: Jakarta.
- BNN.2007. *P4GN di Lingkungan Pendidikan dan Tempat Hiburan*.Seminar penanggulangan narkoba sebagai upaya mempertahankan eksistensi bangsa. Jakarta
- Bunga, Reh. 2002. *Perspektif Kriminologi tentang Penyalahgunaan Narkotika di Kotamadya Binjai*.Skripsi.Fakultas Hukum USU. Medan.
- Chazawi,Adami. 2005.*Pelajaran Hukum Pidana I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Dirdjosiswono,Soedjono. 1987.*Hukum Narkotika Indonesia*. PT. Alumni: Bandung.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Hawari, Dadang. 1991. *Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya*.Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta.
- J. Sloan,Irving. 1984.*Alcohol dan Drug Abuse and the law*.Oceana Publication. Inc: New York.

- Karsono, Edy. 2004. *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*. Irama Widya: Bandung
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Jakarta.
- Makara, Moh. Taufik. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Ma'ruf, Ridha. 1989. *Narkotika, Bahaya, dan Penanggulangannya*. Kharisma Indonesia: Jakarta.
- , 1976. *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*. CV. Marga Djaja: Jakarta.
- Mieczwoski, Thomas. 1992. *Drugs, Crime, and Social Control*. Allyn and Bacon.
- Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pradadya Paramita: Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*. Rafika Aditama: Bandung.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Politik Hukum Indonesia*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Salim, Peter & Yenny Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press: Jakarta
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju: Bandung.
- Supramono, Gatot. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan: Jakarta.
- Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia: Bandung
- Widjaja. 1985. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Amico: Bandung.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Undang-Undang No. 2 Tahun 2010 tentang Kepolisian Negara

PP. No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHP

Perkap No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Narkoba

-oOo-